

**ANALISIS HUKUM TERHADAP UPAYA PERDAMAIAN DALAM  
PERKARA PERCERAIAN NON MUSLIM DI PENGADILAN NEGERI**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar



Oleh:

Ahmad Sabran  
NIM. 10400116093

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2020**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP UPAYA PERDAMAIAN DALAM  
PERKARA PERCERAIAN NON MUSLIM DI PENGADILAN NEGERI**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar



Oleh:

Ahmad Sabran  
NIM. 10400116093

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Sabran  
NIM : 10400116093  
Tempat/Tgl.Lahir : Ujung Pandang / 02 Juni 1998  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : BTN Pao-pao Permai Blok E1 No. 23  
Judul : “Analisis Hukum Terhadap Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri”.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 16 Juli 2020

Penulis



**Ahmad Sabran**  
10400116093

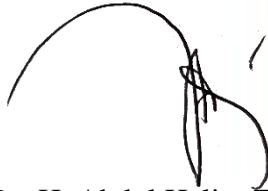
## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal skripsi Saudara **AHMAD SABRAN**, NIM: **10400116093**, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan yang berjudul, "Analisis Hukum Terhadap Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri", memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian Persetujuan diberikan untuk proses lebih lanjut.

Gowa, 28 April 2020

Pembimbing I



Dr. H. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197110201 199703 1 002

Pembimbing II



St. Nurjannah, S.H., M.H  
NIP: 19760822 2003312 2 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Pembimbing penulisan proposal skripsi Saudara **AHMAD SABRAN**, NIM: **10400116093**, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan yang berjudul, "Analisis Hukum Terhadap Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri", memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk sidang hasil.

Demikian Persetujuan diberikan untuk proses lebih lanjut.

Gowa, 02 Juni 2020

Pembimbing I



Dr. H. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197110201 199703 1 002

Pembimbing II



St. Nurjannah, S.H., M.H  
NIP: 19760822 2003312 2 003

Penguji I



Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H  
NIP: 19821207 200901 1 010

Penguji II



Muh. Amiruddin, S.H., M.H  
NIDN: 2005068502

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H  
NIP: 19821207 200901 1 010

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri” yang disusun oleh Ahmad Sabran, Nim 10400116093, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 16 Julii 2020, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

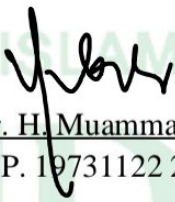
Gowa, 02 Agustus 2020 M  
12 Dzulhijjah 1441 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M. Ag	(  )
Sekretaris	: Dr. Hj. Rahmatiah, HL, M.Pd	(  )
Munaqisy I	: Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H	(  )
Munaqisy II	: Muh. Amiruddin, S.H., M.H	(  )
Pembimbing I	: Dr. H. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag	(  )
Pembimbing II	: St. Nurjannah, S.H., M.H	(  )

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

  
Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.  
NIP. 19731122 200012 1 002



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil alaamiin, Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Analisis Hukum Terhadap Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri**, yang mana merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar. Tak lupa pula, shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menggulung tikar-tikar kebodohan dan menghamparkan permadani-permadani pengetahuan.

Tulisan ini didedikasikan untuk kedua orang tua tercinta penulis yakni Bapak Drs. Saharuddin dan Ibu Istiqamah, S.H., M.H yang senantiasa memberikan doa dan harapan agar kelak anaknya menjadi orang beriman, berilmu, bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa, dan sesama manusia. Kepada segenap keluarga besar AG Drs. H. Muhammad Sagena dan H. Sakkara yang tidak henti-hentinya pula memberi dukungan dan doa kepada penulis.

Pada kesempatan ini pula, penulis mau berterima kasih sebesar-besarnya pada diri penulis sendiri karena akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini walaupun dihadapi dengan penuh rintangan, tantangan, dan ujian yang cukup berat. Penulis sangat berterima kasih sebab tak pernah menyerah walaupun dalam penyusunannya skripsi ini diselesaikan di tengah Pandemi Covid-19, namun berkat usaha, doa, dan harapan penulis menyelesaikannya yang tentu saja menjadi sejarah baru dalam dunia pendidikan penulis. Tak lupa pula penulis akan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis M.A Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Bapak Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan juga selaku Penguji I yang senantiasa sabar membimbing dan menguji penulis hingga selesai.
4. Bapak Abdul Rais Asmar, S.H., M.H Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang senantiasa sabar melayani penulis hingga selesai.
5. Bapak Dr. H. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus Pembimbing I yang selalu membimbing dengan hati dan penuh kesabaran hingga selesai.
6. Ibu St. Nurjannah, S.H., M.H sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus Pembimbing II yang senantiasa membimbing dengan sabar hingga selesai.
7. Bapak Muh. Amiruddin, S.H., M.H sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus Penguji II yang senantiasa menguji penulis dengan baik hingga selesai, terima kasih banyak.
8. Seluruh Dosen, Pejabat dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada umumnya dan dosen jurusan Ilmu Hukum pada khususnya yang senantiasa mengajar penulis.
9. Sahabat-Sahabat terbaik saya Fahmi, Yasin, Teguh, Irfan Ruslim, Ansar, Aldi, Dayat, Alif, Faisal, Teguh, Hairil dan masih banyak lagi yang selalu ada disaat rendah dan puncak situasi penulis, yang selalu meluangkan waktu untuk sekedar bercengkrama mempererat rasa persaudaraan.
10. Teman-teman IPA I dan II MA Madani Alauddin yang kerap kali juga memotivasi penulis untuk belajar lagi dan Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Hukum Kelas C dan Ilmu Hukum Angkatan 2016 DIKTUM, yang telah



membersamai penulis dalam suka dan duka serta mengajarkan banyak hal selama ini, dan membuat penulis selalu punya semangat besar untuk belajar hukum, lagi dan lagi.

11. Instansi terkait Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pegawai, Staf serta Rekan-rekan Praktek Pengenalan Lapangan (PPL) dari berbagai kampus.
12. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 61 Kec. Manuju, Desa Pattalikang, Posko 3 Dusul Lata' (Piank, Wandu, Ugax, Iin, Dg Intang, Yuli, Sherly, ani, Hikmah), yang membuat kehidupan penulis menjadi lebih lebih berwarna, tentunya makasih dengan doa dan dukungan kalian selama ini.
13. Rekan-Rekan di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya, terima kasih banyak.
14. Rekan-rekan Ikatan Remaja Masjid (IRMAS) Masjid HJM, terimakasih.
15. Serta seluruh pihak yang telah membantu terselesainya tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian tugas akhir ini penulis buat, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya Mahasiswa/I Jurusan Ilmu Hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan kedepannya.

Gowa, 16 Juli 2020

Penulis



**Ahmad Sabran**  
10400116069

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-17</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Pengertian Judul.....	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	14
F. Tujuan Penelitian.....	17
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG UPAYA PERDAMAIAAN.....</b>	<b>18-54</b>
A. Pengertian Perdamaian.....	18
B. Dasar Hukum Upaya Perdamaian.....	19
1. Peraturan Khusus Perkawinan.....	19
2. Peraturan Berlaku Umum.....	20
3. Pandangan Berbagai Agama Tentang Upaya Perdamaian.....	21
a. Pandangan Agama Islam.....	22
b. Pandangan Agama Kristen.....	23
c. Pandangan Agama Katolik.....	23

d. Pandangan Agama Hindu.....	24
e. Pandangan Agama Buddha.....	24
f. Pandangan Agama Konghucu.....	25
C. Manfaat Perdamaian dalam Gugatan Perdata.....	27
1. Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.....	27
2. Tertutup Upaya Banding dan Kasasi.....	28
3. Memiliki Kekuatan Eksekutorial.....	29
D. Syarat dan Bentuk Perdamaian.....	29
1. Syarat Perdamaian.....	29
2. Bentuk Perdamaian.....	33
E. Lembaga yang Berperan Melakukan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian	
1. Berlaku Umum (Bagi Muslim dan Non Muslim).....	37
2. Berlaku Khusus Bagi Orang Muslim.....	49
<b>BAB III TINJAUAN TENTANG PERKARA PERCERAIAN.....</b>	<b>55-65</b>
A. Pengertian Perceraian.....	55
B. Alasan-Alasan Perceraian.....	56
C. Akibat Hukum Perceraian.....	57
D. Putusnya Perkawinan Selain Perceraian.....	58
1. Kematian.....	58
2. Keputusan Pengadilan.....	58
E. Pandangan Berbagai Agama Tentang Perceraian.....	59
1. Pandangan Agama Islam.....	60
2. Pandangan Agama Kristen.....	61

3. Ajaran Agama Katolik.....	62
4. Ajaran Agama Hindu.....	64
5. Ajaran Agama Buddha.....	64
6. Ajaran Agama Konghucu.....	65

**BAB IV ANALISIS TERHADAP UPAYA PERDAMAIAN DALAM  
PERKARA PERCERAIAN NON MUSLIM..... 66-87**

A. Gambaran Singkat Tentang Pengadilan Negeri.....	66
B. Analisis Pelaksanaan Upaya Perdamaian Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri.....	70
C. Analisis Faktor-Faktor yang Menghambat Upaya Perdamaian Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri.....	75

**BAB V PENUTUP..... 88-89**

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	99

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

**Nama: Ahmad Sabran**

**NIM: 10400116093**

**Judul: Analisis Hukum Terhadap Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri.**

---

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan oleh para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam kenyataannya, pemberlakuan mediasi masih belum optimal dalam menyelesaikan perkara khususnya perceraian. Tercatat dari banyaknya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Negeri dalam rentan waktu 2011-2019 hanya sebagian kecil yang berhasil. Adapun pokok masalah yakni bagaimanakah upaya perdamaian dalam perkara perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri. Adapun sub masalah yakni bagaimana pelaksanaan dan faktor-faktor penghambat jalannya perceraian. Tujuan utama dalam penelitian ini yakni dengan mengetahui bagaimana pelaksanaan dan faktor-faktor yang menghambat upaya perdamaian terkhusus dalam perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Negeri.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka dimana penelitian mendiskripsikan secara umum mengenai objek yang dibicarakan sesuai dengan data-data yang didapatkan dari berbagai sumber yang ada melalui website, repository, jurnal-jurnal online dan lain-lain dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun data penelitian ini bersumber dari data sekunder. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah internet searching berupa website, repository, jurnal-jurnal dan lain-lain. Adapun teknik pengolahan dan analisis data yakni dengan seleksi, klasifikasi, reduksi dan editing data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal, karena upaya perdamaian maksimal 30 hari tetapi terdapat beberapa pengadilan yang sudah menentukan hasil mediasi di bawah 30 hari. Kemudian faktor-faktor yang menghambat dari segi substansi hukum tidak ada hambatan karena telah cukup tersedia regulasi yang mengaturnya, sedangkan dari segi struktur hukum: kurangnya mediator bersertifikat, sarana yang kurang memadai, dan dari segi budaya hukum: telah menipisnya asas musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian masalah sehingga masyarakat menganggap bahwa pengadilan hanyalah tempat penentuan kalah dan menang.

Mencermati rendahnya perkara perceraian yang berhasil didamaikan maka penulis menyarankan: Apabila dalam proses mediasi tidak/belum tercapai kesepakatan, hendaknya mediator menunda/menunggu sampai batas waktu 30 hari untuk tetap mengupayakan perdamaian. Substansi Hukum, Penggugat yang tidak beriktikad baik perlu diberikan sanksi yang lebih tegas. Struktur hukum, diperlukan penambahan mediator dari unsur hakim dan luar hakim yang memiliki sertifikat dan diberi insentif yang ditanggung oleh negara Budaya hukum, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pengadilan bukanlah tempat hanya sekedar melegalisasi putusnya ikatan perkawinan.

**Kata Kunci: Upaya Perdamaian, Perkara Perceraian, Pengadilan Negeri.**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang Masalah*

Di Indonesia dikenal pemisahan antara hukum perdata dan hukum publik. Dengan demikian, terdapat perbedaan proses penyelesaian perkara perdata dengan perkara publik. Perkara perdata inisiatif mengajukan perkara tergantung pada orang yang berperkara (yang dirugikan) sedangkan dalam perkara publik karena yang menyangkut kepentingan umum maka negaralah yang harus berinisiatif untuk mengajukan perkara tersebut ke pengadilan.<sup>1</sup> Perkara perceraian termasuk dalam perkara hukum perkawinan, sementara hukum perkawinan masuk dalam lapangan hukum perdata.

Hal-hal yang menyangkut perkawinan telah di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Seiring dengan perkembangan zaman terdapat substansi dalam Undang-Undang tersebut yang telah mengalami perubahan yaitu batas usia minimal kawin perempuan semula 16 tahun meningkat menjadi 19 tahun (sama dengan laki-laki). Perubahan tersebut dituangkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 yang disahkan oleh Presiden RI ke-7 yakni Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta.

Karena hanya batas usia minimal bagi wanita yang mengalami perubahan, maka dari itu substansi UU No. 1 Tahun 1974 lainnya masih berlaku karena tidak

---

<sup>1</sup> Marilang, dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Makassar: Alauddin Press, 2006), h.127.



mengalami perubahan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 65A UU No. 16 Tahun 2019.<sup>2</sup>

Sesuai dengan fitrahnya manusia senantiasa mendambakan kebahagiaan, baik lahir maupun batin. Salah satu jalan untuk meraih kebahagiaan tersebut dengan berpasangan lawan jenis dalam suatu rumah tangga dengan melakukan perkawinan. Perkawinan tersebut dilakukan oleh penganut agama manapun, baik penganut agama Islam maupun Non Islam.

Agama yang resmi terdaftar di Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 sebanyak 6 diantaranya: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Dengan demikian orang yang menganut agama selain Islam di sebut dengan Non Muslim seperti penganut Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Dengan adanya penetapan tersebut, berarti sepanjang perkawinan dilakukan oleh calon suami isteri sesama keyakinan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi muslim, sedangkan bagi Non Muslim dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka perkawinan tersebut adalah sah sehingga negara dapat memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut, terkait pemenuhan hak-hak suami isteri maupun anak-anaknya.<sup>3</sup>

Perkawinan bukanlah sekedar upaya mempertemukan manusia yang berlainan jenis dengan tujuan materil belaka, akan tetapi diharapkan tujuan yang seimbang antara kebahagiaan lahir dan batin antara kedua belah pihak yang dalam hal ini suami

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*.

<sup>3</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia.2011), h.171.

dan isteri sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Walaupun dalam UU No. 1 Tahun 1974 telah ditegaskan asas-asas perkawinan antara lain tujuan perkawinan dilaksanakan untuk selama-lamanya atas dasar saling mencintai dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, tetapi terkadang dalam dinamika kehidupan berumah tangga tujuan perkawinan tidak selamanya dapat terwujud.

Keretakan rumah tangga dapat berakibat terjadinya rencana pemutusan hubungan perkawinan dalam bentuk perceraian, yang dapat berimbas secara materil maupun psikis pada suami isteri maupun terhadap anak-anaknya.

Apabila dalam hubungan keluarga tidak terbentuk ketiga unsur perkawinan yakni *sakinah mawaddah warahmah*, maka suami isteri pada akhirnya mengarah pada rencana pemutusan ikatan tali perkawinan (perceraian) melalui lembaga peradilan. Lembaga peradilan yang menangani sengketa perkawinan bagi orang Muslim adalah Pengadilan Agama, sedangkan bagi Non Muslim di Pengadilan Negeri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009, bahwa kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

<sup>5</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Haris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h.67.

Sedangkan alasan-alasan pemutusan perkawinan baik karena penetapan pengadilan maupun karena perceraian diatur dalam Bagian Penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan dipertegas dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dimana peraturan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi penduduk yang beragama Islam tetapi juga bagi yang tidak beragama Islam.<sup>6</sup>

Pasangan suami isteri Non Muslim dapat bercerai dengan mengajukan gugatan cerai (istilahnya sama) pada Pengadilan Negeri, sedangkan bagi pasangan muslim apabila sang suami yang mengajukan disebut dengan permohonan talak dan jika sang isteri yang mengajukan disebut dengan gugatan cerai.

Perceraian pada umumnya dalam pandangan berbagai agama di dunia ini khususnya yang dianut di Indonesia, merupakan sebagai jalan terakhir yang bisa dilakukan. Pada dasarnya, seluruh agama yang ada di Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu) mengatur tentang masalah yang ada dalam perkawinan termasuk dalam perkara perceraian.<sup>7</sup>

Dalam ajaran agama Islam perceraian itu dibolehkan, namun pada dasarnya dilarang, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:<sup>8</sup>

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاق

Artinya:

Perbuatan yang halal dan sangat dibenci oleh Allah SWT adalah thalak.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.75.

<sup>7</sup> Istiqamah, Istiqamah. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata)." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4.1 (2017): 54-67.

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 213.

<sup>9</sup> Hadits dari Ibnu Umar ra, diriwayatkan oleh Abu Daud no. 2180 dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar.

Sementara ajaran Kristen lebih longgar karena perceraian dimungkinkan karena alasan-alasan tertentu.<sup>10</sup>

Pandangan yang sangat keras terdapat dalam ajaran Katolik yang mengenal sistem perkawinan monogami absolut, pada umumnya memandang perkawinan sebagai suatu lembaga yang abadi, sehingga bubarnya perkawinan hanya dipisahkan oleh kematian. Dengan kata lain, bahwa bagi yang beragama Katolik, maka perceraian hanya diputuskan oleh kematian salah satu dari suami atau isteri.<sup>11</sup>

Perkembangan selanjutnya KUHPerdara mengalami pembaharuan sebagai pengaruh dari ajaran Kristen yang memungkinkan perceraian dengan beberapa alasan tertentu, barulah dikenal lembaga perceraian meskipun masih mendapatkan tantangan dari kalangan pemuka agama Katolik.<sup>12</sup>

Pandangan ajaran Agama Hindu juga sama seperti diutarakan oleh B. T. Tambunan bahwa dalam kitab suci Veda bahwa perkawinan adalah terbentuknya sebuah keluarga yang berlangsung sekali dalam hidup manusia sesuai dengan yang ditegaskan dalam kitab Manava Dharmaśāstra DX 101-102.

Dalam pandangan tersebut di atas, jelas bahwa ajaran agama Hindu tidak menginginkan adanya perceraian. Bahkan sebaliknya, dianjurkan agar perkawinan yang kekal hendaknya dijadikan sebagai tujuan tertinggi bagi pasangan suami isteri. Dengan terciptanya keluarga bahagia maka kebahagiaan yang kekal akan tercapai pula.

Selaras dengan hal tersebut, dalam Hukum Perkawinan Agama Buddha (HPAB) keputusan Sangha Agung dalam Pasal 1, para teolog agama Buddha

---

<sup>10</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prestika Pustaka Publisher, 2006), h.138.

<sup>11</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, h.138.

<sup>12</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, h.138.

memberikan pengertian bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk hubungan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan *Dhamma*.

Senada dengan hal tersebut, Hukum Perkawinan Agama Konghucu tentang Upacara Peneguhan Hukum Perkawinan Konghucu (*Liep Gwan*) dalam angka 19 menegaskan “Oleh karena hakikat dari perkawinan mengandung nilai-nilai luhur maka perceraian tidak dikenal dalam kehidupan umat Konghucu”.<sup>13</sup> Dengan demikian perceraian tidak dikenal dalam ajaran agama tersebut, oleh sebab itu perceraian harus dihindari sebisa mungkin.

Pandangan dari berbagai agama tersebut, pada umumnya menunjukkan bahwa perceraian atau thalak merupakan jalan terakhir yang boleh ditempuh jika kondisi rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi atau apabila dipertahankan justru menimbulkan mudharat yang lebih besar terhadap suami isteri atau anaknya. Oleh karena itu perceraian harus dipersulit dan merupakan pintu darurat yang bisa ditempuh bila sudah tidak ada solusi pemecahannya.

Karena sifatnya sebagai jalan terakhir atau pintu darurat, Istiqamah berpendapat bahwa: Upaya perdamaian diamanahkan untuk dilakukan karena pada prinsipnya tujuan perkawinan ialah dengan membentuk hubungan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta didalam Islam perceraian merupakan suatu perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah Swt sebelum terjadi perceraian tersebut dahulu harus ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak yaitu suami atau isteri.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> E. S. Kristanti. (2010). *Status Hukum Terhadap Perkawinan Konghucu Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro). h.58.

<sup>14</sup> Istiqamah, *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.120.



Dalam hukum positif suatu perceraian tidak diperkenankan dilakukan atas dasar persetujuan antara suami isteri yang tidak didukung oleh alasan yang dibenarkan oleh perundang-undangan.

Karena sifatnya jalan terakhir maka Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di negara ini memberikan perintah kepada hakim sebagai aparat penegak hukum untuk berupaya mendamaikan suatu permohonan thalak atau cerai gugat yang diajukan oleh salah satu pihak dari suami atau isteri tersebut.

Perintah untuk berupaya mendamaikan tersebut di atas terdapat pada Pasal 39 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa:

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka upaya perceraian dalam penyelesaiannya jelas melibatkan campur tangan pengadilan maupun orang lainnya, tetapi hakim sebagai unsur yang paling menentukan.

Karena upaya perdamaian merupakan perintah Undang-Undang, maka putusan yang telah ditetapkan pengadilan dapat dibatalkan oleh penggugat maupun tergugat apabila terlebih dahulu tidak diupayakan untuk damai.<sup>15</sup>

Lembaga perdamaian dan kewajiban hakim untuk menyelesaikan perkara secara damai bukanlah suatu kewajiban yang bersifat formalitas belaka, tetapi merupakan imperatif artinya perintah yang menandakan hakim harus dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan cara menuntun, mengarahkan serta memberi petunjuk demi tercapainya upaya tersebut meskipun akhirnya

---

<sup>15</sup> Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Alumni, 1986), h.36.



bermuara pada para pihak tanpa harus mencampuri materi (isi) perdamaian, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan serta kesusilaan yang berlaku.

Dengan demikian pada dasarnya setiap perkara perceraian bagi Non Muslim yang masuk di Pengadilan Negeri harus didamaikan oleh hakim secara serius dan optimal, sebagaimana yang ditegaskan dalam Hukum Acara Perdata yaitu *Het Indlandseh Reglement* (HIR) dan *Rechts Reglemen Buitengewesten* (RBg) sebagai hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Negeri khususnya dalam pasal 130 *HIR* dan Pasal 154 *RBg*, dan secara khusus Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan tentang upaya perdamaian harus dilakukan oleh hakim sebelum memasuki persidangan selanjutnya melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).<sup>16</sup> Khusus dalam perkara perceraian paling tepat digunakan adalah mediasi, yaitu suatu perundingan yang dilakukan diluar persidangan yang ditengahi oleh mediator.

Dalam perkara perceraian, fungsi dari upaya mendamaikan pasangan suami isteri untuk rujuk kembali, menjadi kewajiban hakim sebagai pihak yang dapat berperan sebagai mediator yang harus dilakukan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Meskipun upaya perdamaian diwajibkan dalam perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 namun dalam praktek masih banyak ditemukan upaya perdamaian tersebut hanya sepintas lalu dan terkesan hanya untuk memenuhi formalitas hukum, dalam prakteknya sengketa perceraian yang bisa didamaikan relatif sedikit sekali bahkan ada yang tidak mampu

---

<sup>16</sup> Republik Indonesia Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

didamaikan, jika dibandingkan dengan putusan terhadap perkara perdata lainnya seperti jual beli, tukar menukar, simpan pinjam dan lain-lain yang ditangani oleh Pengadilan Negeri.

Contohnya di Pengadilan Negeri Sungguminasa, selama tiga tahun terakhir sejak tahun 2017 sampai 2019 dari 36 perkara perceraian Non Muslim yang masuk dan telah *incracht*, yang berhasil didamaikan tidak ada atau 0 %.<sup>17</sup>

Berpijak pada data tersebut, peneliti akan menelusuri peranan hakim di Pengadilan Negeri dalam memediasi dan berusaha mencegah terjadinya perceraian. Hakim bukan hanya dituntut memutuskan suatu perkara, tetapi juga mengupayakan perdamaian secara optimal diluar persidangan dalam peran sebagai mediator. Mengingat hakim dianggap figur yang dapat memberi solusi yang tepat saat masyarakat mendapatkan persoalan, sehingga angka perceraian dapat diminimalisir.

Berhasilnya mengupayakan perdamaian bagi perkara perceraian disamping prosesnya cepat, sederhana dan biaya ringan juga dapat membantu mengurangi menumpuknya perkara ditingkat banding dan kasasi.

Mengacu pada hal tersebut, maka masalah upaya perdamaian menarik untuk dikaji agar para hakim Pengadilan Negeri dapat mengembangkan strategi dan mengupayakan perdamaian secara optimal bagi pihak-pihak yang berperkara.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun pokok masalah “Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri?”. Agar pembahasan tidak terlalu meluas maka dibatasi dalam sub masalah antara lain:

---

<sup>17</sup> Prihatini (27 Tahun), Calon Hakim Pengadilan Negeri, Wawancara, Sungguminasa, 29 Januari 2020.

1. Bagaimana Pelaksanaan Upaya Perdamaian Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri ?
2. Apakah Faktor-Faktor yang Menghambat Upaya Perdamaian Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri ?

### ***C. Pengertian Judul***

Berdasarkan paparan dalam latar belakang, adapun pengertian judul dalam penelitian Analisis Hukum Terhadap Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri antara lain:

1. Analisis adalah berasal dari kata Analisa yang berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
2. Upaya perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.<sup>18</sup>
3. Perkara Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu yang dalam hal ini suami atau isteri.<sup>19</sup>
4. Non Muslim adalah orang-orang yang menganut agama selain Islam.
5. Pengadilan Negeri adalah Lembaga yang berkompetensi menangani perkara perdata dan pidana kecuali ditentukan lain oleh undang-undang di wilayah hukumnya termasuk perkara perceraian bagi Non Muslim.

Berdasarkan definisi operasional di atas, maka adapun pengertian dari judul Analisis Hukum Terhadap Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian Non Muslim

---

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.160.

<sup>19</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1992), h.42.

di Pengadilan Negeri untuk mengkaji proses pelaksanaan dan penghambat baik dari pihak hakim pemeriksa, mediator, suami istri yang berperkara dalam upaya perdamaian perkara perceraian Non Muslim yang terdiri dari enam agama yang diakui berdasarkan Penetapan Presiden di Pengadilan Negeri.

#### ***D. Kajian Pustaka***

Agar pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi dengan beberapa sumber buku yang didalamnya terdapat pandangan dari sebagian ahli dan berkaitan dengan pembahasan rencana penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Dalam buku ini dibahas tentang Putusan Akta Perdamaian yang meliputi: Sulit Mendesain Sistem Peradilan yang Efektif, Penyelesaian Melalui Perdamaian, Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kriteria Dasar untuk Mendamaikan, Syarat Formil Putusan Perdamaian, Putusan Perdamaian yang Bertentangan dengan Undang-Undang dapat Dibatalkan dan Kekuatan Hukum yang Melekat pada Putusan Akta Perdamaian. Buku ini lebih lengkap membahas tentang perdamaian dari pada buku lainnya.
2. Abdul Manan, dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. Dalam buku ini dibahas tentang Upaya Perdamaian yang meliputi: Pengertian Perdamaian, Syarat Formal dalam Upaya Perdamaian, Manfaat Perdamaian dalam Gugatan Perdata, Perdamaian dalam Perkara Perceraian, dan Perdamaian Perkara Perceraian Pada Tingkat Banding. Tetapi tidak ada secara khusus membahas upaya perdamaian perkara perceraian Non Muslim.

3. Istiqamah, dalam bukunya Hukum Perdata, Hukum Orang dan Keluarga. Dalam buku ini dibahas tentang Ketentuan Perjanjian, Pencegahan, Pembatalan dan Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 yang meliputi: Perjanjian Perkawinan, Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan. Namun hanya sebagian kecil yang membahas tentang upaya perdamaian dalam perkara perceraian.
4. Ahmad Rofiq, dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia. Dalam buku ini banyak dibahas tentang Perkawinan, Pencegahan Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Putusnya Perkawinan, Alasan Perceraian, Putusnya Perkawinan, Tata Cara Bercerai. Namun tidak ada yang menyinggung tentang upaya perdamaian dalam perkara perceraian.
5. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia. Dalam buku ini banyak membahas tentang perdamaian dan tahapannya secara umum untuk terkait perkara perdata, namun tidak ada secara khusus membahas upaya perdamaian dalam perkara perceraian Non Muslim.

Kelima buku di atas saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, dikarenakan isi dari bab dan sub bab dari buku tersebut ada yang tidak dibahas dalam satu buku namun dijelaskan di buku selanjutnya. Tetapi esensi yang terdapat pada buku di atas masing-masing berkaitan dengan pokok bahasan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian.

Untuk mengetahui hukum berlaku efektif atau kurang dalam masyarakat termasuk dalam upaya perdamaian dalam perkara perceraian maka perlu dikemukakan teori tentang efektifitas. Menurut Lawrence M. Friedman dalam Ahkam Jayadi tentang hukum atau aturan perundang-undangan pada dasarnya memiliki tiga



komponen dasar yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Ketiga komponen itu adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Subtansi hukum (*legal substance*).
2. Struktur hukum (*legal structure*).
3. Budaya hukum (*legal cultur*).

Ketiga unsur di atas dari sistem hukum tersebut antara satu dan yang lainnya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Jika terdapat satu unsur yang tidak berfungsi maka tidak bisa bekerja dengan baik sehingga akan mempengaruhi jalannya sistem hukum (*disfunction*).

Sedangkan teori dari Soerjono Soekanto, untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap optimalisasi upaya perdamaian dengan menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menyatakan bahwa dampak negatif atau positif suatu hukum tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri yang dimaksud adalah undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat dimana hukum tersebut berlaku.
5. Faktor budaya.

---

<sup>20</sup> Ahkam Jayadi, *Hukum dan Keadilan Menuak Kewenangan Penegak Hukum Dalam Penahanan dan Penangguhan Penahanan*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), h.33.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h.5.



### ***E. Metode Penelitian***

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode yang dipergunakan dalam setiap tahapan-tahapan penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian dan lain-lain.<sup>22</sup>

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian pustaka (*library research*). Bila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian yang bertitik tolak dari data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang ada melalui hasil-hasil penelitian dari buku, repository, website yang dapat diakses secara online dari berbagai perguruan tinggi dan pengadilan serta jurnal-jurnal online yang menyangkut tentang upaya perdamaian.

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Terdiri atas satu pendekatan yakni pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara menyoroti fakta-fakta yang terjadi dalam realita antara suami isteri yang bertikai dan mediator dalam pelaksanaan upaya perdamaian perkara perceraian yang diajukan oleh orang-orang Non Muslim di Pengadilan Negeri.

#### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka dalam berbagai buku, hasil penelitian (laporan penelitian, disertasi, tesis, skripsi) yang diakses melalui repository perguruan tinggi dan website pengadilan yang ada di Indonesia, jurnal-jurnal yang

---

<sup>22</sup> UIN Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian*, (Makassar: Alauddin Press, 2013), h.15.

dapat diakses secara online, yang menyangkut tentang upaya perdamaian dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri.

#### **4. Metode Pengumpulan**

Pengumpulan data dalam penelitian sangat penting karena tujuan utama dalam melakukan penelitian adalah mendapatkan suatu data. Adapun teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Data yang diperoleh langsung dari data primer yang ada melalui hasil-hasil penelitian dari website yang dapat diakses secara online misalnya repository dari berbagai perguruan tinggi serta jurnal-jurnal online yang terkait dengan upaya perdamaian dalam perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri.
- b. Data sekunder yang diperoleh dari website pengadilan tentang upaya perdamaian perkara perceraian di Pengadilan Negeri.
- c. *Internet Searching* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi yang bersumber dari internet, guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta dan teori yang berkaitan dengan penelitian dan sebagai solusi dalam mengakses data dengan cara yang singkat dan cepat dalam menemukan informasi yang diperlukan.

#### **5. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah suatu alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data agar tersusun secara sistematis dan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Instrumen sebagai alat pada waktu penelitian yang menggunakan suatu metode antara lain:

- a. Peneliti
- b. Laptop/Android

c. Jaringan Internet

d. Alat Tulis

## **6. Teknik pengelolaan dan Analisis Data**

### **a. Teknik Pengelolaan Data**

Metode pengelolaan data dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Seleksi data sesuai dengan topik tentang upaya perdamaian perkara perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri.
- 2) Klasifikasi data (memilah-milah data) secara sistematis tentang upaya perdamaian dalam perkara perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri.
- 3) Reduksi data adalah proses mengubah data kedalam pola, fokus, kategori atau pokok permasalahan sesuai dengan topik tentang upaya perdamaian dalam perkara perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri.
- 4) Editing data adalah suatu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan agar mendapatkan data yang sesuai dengan literatur yang diperoleh dari sumber bacaan.

### **b. Teknik Analisis Data**

Langkah terakhir dalam penyusunan skripsi ini yaitu proses analisa data yang merupakan upaya menemukan jawaban dari permasalahan dan hal-hal yang akan diperoleh dari penelitian pendahuluan. Data kemudian disusun secara sistematis menurut klasifikasi masing-masing sehingga mudah dipahami untuk menjawab permasalahan yang ada. Kemudian yang terakhir data diuraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis.

## ***F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Upaya Perdamaian Terhadap Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Upaya Perdamaian Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara ilmiah membantu pengembangan terhadap studi ilmu hukum.
- b. Secara praktis dapat menjadi bahan masukan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara melalui upaya perdamaian.



## BAB II

### TINJAUAN TENTANG UPAYA PERDAMAIAAN

#### A. Pengertian Perdamaian

Perdamaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penghentian permusuhan.<sup>1</sup>

Dalam Islam perdamaian disebut dengan *ishlah* artinya memutuskan suatu persengketaan.<sup>2</sup>

Sedangkan istilah perdamaian sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.<sup>3</sup>

Menurut Subekti perdamaian dikenal dengan istilah *dading* atau *compromise* adalah suatu bentuk penyelesaian tanpa konflik dan berakhir dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara sehingga tidak diperkenankan untuk mengajukan upaya hukum lain seperti banding dan kasasi.<sup>4</sup>

Dalam bahasa latin dikenal dengan istilah *mediare* yang berarti di tengah-tengah. Menurut Abdul Halim Talli, makna kata tersebut menunjuk bahwa peran seseorang sebagai pihak ketiga yang disebut dengan mediator, dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara dua pihak yang bersengketa.

---

<sup>1</sup> Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bmedia, 2017).

<sup>2</sup> Nasharuddin Salim, *Pemberdayaan Lembaga Damai Pada Pengadilan Agama Mimbar Hukum*, (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpera, 2004), h.5.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *KUHPerdara dan KUHPerdara*, (Jakarta: Pustaka Buana, 2014) h.402.

<sup>4</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermesa, 1992), h.172.

Posisi berada di “tengah”, maka mediator harus bersikap netral dan tidak memihak pada salah satu pihak serta mengupayakan sejumlah kesepakatan yang memuaskan semua pihak sehingga perdamaian dapat diwujudkan.<sup>5</sup>

## ***B. Dasar Hukum Upaya Perdamaian***

Upaya perdamaian dapat dilihat dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

### **1. Peraturan Khusus Perkawinan**

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat 1 yang berbunyi:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

- b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 31 yang berbunyi:

- 1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Kedua aturan ini berlaku bagi seluruh perkara perceraian bagi warga negara Indonesia yang menganut berbagai agama, yang berarti berlaku bagi muslim maupun Non Muslim.

- c. UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 yang berbunyi:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal tersebut di atas tidak mengalami perubahan walaupun telah lahir UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. Upaya perdamaian tersebut juga didukung dengan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), yang hanya diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengkhususan tersebut diatur dalam

---

<sup>5</sup> Abdul Halim Talli. "Mediasi Dalam Perma No. 1 Tahun 2008." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2.1 (2015): 76-93.



Pasal 2 dan 3A UU No. 3 Tahun 2006 yang intinya berupa penegasan bahwa Pengadilan Agama hanya menangani pencari keadilan yang beragama Islam dengan pengkhususan pengadilan yang menangani perkara sesuai perundang-undangan.<sup>6</sup>

## **2. Peraturan Berlaku Umum**

- a. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 58 yang berbunyi:  
Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Khusus terkait dengan upaya perdamaian dalam perkara perceraian, penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 60 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi:

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Isi pasal tersebut di atas mempertegas bahwa upaya perdamaian perkara perceraian, penyelesaian perkara di luar pengadilan negara dapat dilakukan melalui salah satu alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), khusus perkara perceraian melalui lembaga mediasi yang teknis pelaksanaannya telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.

- b. *HIR* Pasal 130 Ayat 1-3 dan *R.Bg* Pasal 154 Ayat 1-3.

Menegaskan bahwa jika pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka Ketua Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut.<sup>7</sup>

Kedua pasal tersebut berisi langsung perintah untuk mendamaikan terlebih dahulu semaksimal mungkin oleh hakim pengadilan tempat perkara terdaftar, hanya

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama*.

<sup>7</sup> V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materil*, (Jakarta: Erlangga, 2015), h.119.

saja belum di atur tentang tata cara perdamaian dan pihak-pihak yang dapat mendamaikan atau memediasi perkara tersebut.

Hal ini dipertegas dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang memberikan sanksi tegas apabila masyarakat tidak melalui proses mediasi karena mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan ada daya paksa bagi masyarakat. Landasan yuridis PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>8</sup> Artinya perkara perceraian yang sudah diputus oleh pengadilan tanpa melalui mediasi (upaya perdamaian) batal secara hukum.

c. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam PERMA tersebut di atas telah diatur tata cara perdamaian dan ditentukan pihak atau hakim mediasi untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak. Walaupun masih bersifat umum tetapi sengketa perceraian bagi Non Muslim juga mengacu pada ketentuan ini. Dengan demikian mediator harus berperilaku sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ini.<sup>9</sup>

### **3. Pandangan Berbagai Agama Tentang Upaya Perdamaian**

Upaya perdamaian yang terdapat dalam hukum positif tersebut di atas, jauh sebelumnya telah diatur dalam berbagai ajaran agama yang ada di Indonesia di bawah ini:

---

<sup>8</sup> Arum Kusumaningrumand Benny Riyanto Yunanto. "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang." *Diponegoro Law Journal* 6.1 (2017): 1-10.

<sup>9</sup>[https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_remository&Itemid=46&func=select&id=494](https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=select&id=494), Diakses 11 April 2020, Pukul 13.50 WITA.

#### a. Pandangan Agama Islam

Upaya perdamaian dalam perkara perceraian bagi umat Islam dijelaskan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an yakni:

##### 1) Q.S. Al-Hujarat (49): 9

وَإِذَا نَفَخْتَ الْبُرْجَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

Bahwa jika dua golongan orang yang bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian itu harus dilakukan dengan adil dan benar sesungguhnya Allah SWT sangat mencintai orang yang berlaku adil.<sup>10</sup>

##### 2) Q.S. An-Nisa (4): 128

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صِدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.<sup>11</sup>

Berdasarkan kedua ayat tersebut, maka dalam Islam memberikan penekanan bahwa apabila suami isteri hendak memutuskan hubungan perkawinannya (bercerai) harus didamaikan seoptimal mungkin.

#### b. Pandangan Agama Kristen

Perceraian sama sekali tidak dilegalkan dalam pernikahan Kristen, sebagaimana yang tertera dalam Al-Kitab Markus 10:9 yang berbunyi “apa yang sudah dipersatukan Allah, tidak dapat diceraikan oleh manusia”. Jadi manusia tidak

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h.516.

<sup>11</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*, h.84.

mempunyai hak untuk menggagalkan perjanjian pernikahan antara tuhan dengan pasangannya.

Dengan demikian apabila rumah tangga sudah goyang atau menuju keretakan maka harus di damaikan supaya tidak terjadi perpisahan, karena perpisahan dianggap sebagai dosa besar.<sup>12</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di atas bahwa pada dasarnya ajaran Kristen tidak menghendaki perceraian antara suami dan isteri.

### c. Pandangan Agama Katolik

Dalam Ajaran Katolik, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah untuk berpasangan menjadi suatu daging. Cinta suami isteri merupakan lambing cinta Allah dan Kristus yang bersifat kekal, oleh sebab itu yesus kristus menghendaki setiap pernikahan merupakan sebuah komitmen seumur hidup sebagaimana yang tertera dalam kitab suci Perjanjian Baru sebagaimana yang tertera dalam Matius 19:6 yang berbunyi: “Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia”.<sup>13</sup>

Berdasarkan ayat tersebut bahwa dalam ajaran Katolik tidak dikenal perceraian, dengan demikian meskipun telah terjadi perceraian secara sipil tetapi secara Gerejani masih tetap sebagai suami isteri meskipun salah satunya atau keduanya telah menikah dengan orang lain. Pernikahan yang kedua dari pasangan suami isteri tersebut dengan orang lainnya menurut agama Katolik tidak sah sehingga dianggap melakukan perzinahan yang berarti melakukan dosa terus-menerus.

---

<sup>12</sup> <https://www.kompasiana.com/afnita/551970b98133111b779de106/perceraian-menurut-iman-kristen>, Diakses 04 Mei 2020, Pukul 20.10 WITA.

<sup>13</sup> <http://newslab.uajy.ac.id/2018/12/10/perceraian-menurut-pandangan-agama-katolik/>, Diakses 04 Mei 2020, Pukul 20.10 WITA.

#### d. Pandangan Agama Hindu

Pandangan ajaran agama Hindu juga sama seperti diutarakan oleh B. T. Tambunan bahwa dalam kitab suci Veda bahwa perkawinan adalah terbentuknya sebuah keluarga yang berlangsung sekali dalam hidup manusia sesuai dengan yang ditegaskan dalam kitab Manava Dharmasastra DX 101-102 sebagai berikut:

*Anyonyasyawayabhicaroghaweamamantikah Esa dharmah samasenainevah stripumsayoh parah*

(Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami isteri).

*Tatha nityam xateyam stripumsau tu kritakrivau. Jatha nabhicaretam tau wiyuktawitaretaram*

(Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain).<sup>14</sup>

Berdasarkan kedua sloka di atas nampak jelas bahwa agama Hindu tidak menginginkan adanya perceraian. Bahkan sebaliknya, dianjurkan agar perkawinan yang kekal hendaknya dijadikan sebagai tujuan tertinggi bagi pasangan suami isteri. Dengan terciptanya keluarga bahagia dan kekal maka kebahagiaan yang kekal akan tercapai pula.<sup>15</sup>

#### e. Pandangan Agama Buddha

Menurut Hukum Perkawinan Agama Buddha (HPAB) keputusan Sangha Agung dalam Pasal 1 memandang bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dan wanita sebagai isteri yang berlandaskan cinta kasih (*metta*) dan rasa sepenanggungan (*mudita*) dengan tujuan untuk membangun hubungan rumah tangga yang bahagia dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para *Bodhisatwa-Mahasatwa*. Sehingga, para teolog

---

<sup>14</sup> Bunga Tiurmaida Tambunan. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Menurut Hukum Hindu dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus No. 73/Pdt. G/2014/PN. Mdn)*. Diss. Universitas Medan Area, 2016, h.22.

<sup>15</sup> <http://denkayu.blogspot.com/2014/12/perkawinan-menurut-hukum-hindu.html>, Diakses 22 April 2020, Pukul 20.15 WITA.



agama Buddha memberikan pengertian bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk hubungan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan *Dhamma*.<sup>16</sup>

Agama Buddha tidak melarang perceraian tetapi juga tidak mendukung terjadinya perceraian. Ajaran Sang Guru Agung memberikan suatu cara untuk menjalankan kehidupan keluarga yang harmonis serta saling mencintai. Dengan demikian, apabila ada permasalahan dalam suatu hubungan keluarga, haruslah diupayakan untuk dapat diselesaikan dan jadikanlah perceraian sebagai jalan terakhir. Jangan menyerah untuk menanggulangi masalah yang ada dalam hubungan rumah tangga bagaimanapun beratnya serta jangan mudah untuk mengatakan cerai kepada pasangan, dikarenakan hal-hal tersebut sangat jelas tidak dianjurkan dalam ajaran agama Buddha.

f. Pandangan Agama Konghucu

Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia pada tanggal 21 Desember 1975 mensyahkan Hukum Perkawinan Agama Konghucu tentang Upacara Peneguhan Hukum Perkawinan Konghucu, yang dikenal dengan *Liep Gwan* antara lain menegaskan dalam angka 19 *Liep Gwan* sebagai berikut: “Oleh karena hakikat dari perkawinan mengandung nilai-nilai luhur maka perceraian tidak dikenal dalam kehidupan umat Konghucu”.<sup>17</sup> Dengan demikian perceraian tidak dikenal dalam ajaran agama tersebut, maka dengan demikian perceraian harus dihindari sebisa mungkin, sebagaimana yang ditegaskan dalam angka 20-21 *Liep Gwan* sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Imam Firmansyah. "Perkawinan dalam pandangan agama islam dan buddha; sebuah studi perbandingan a." (2012), h.44-45.

<sup>17</sup> E. S. Kristanti. (2010). *Status Hukum Terhadap Perkawinan Konghucu Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro), h.58.



Upaya untuk menghindari perceraian kedua belah pihak terkait, perlu untuk melakukan intropeksi diri (memeriksa ke dalam diri sendiri) atau tidak merasa benar sendiri, dan tidak ingkar dari prasetya yang ikrarkan dalam peneguhan perceraianya. Bilamana terjadi sesuatu yang tidak lagi dapat diupayakan rujuk bagi kedua pihak maka Pengadilan Negeri sebagai instansi yang menangannya.<sup>18</sup>

Dari beberapa ketentuan di atas baik dari ketentuan Perundang-undangan maupun agama, dapat dipahami bahwa kewajiban mendamaikan para pihak dalam sengketa perceraian bersifat imperatif yakni sebagai beban yang diwajibkan kepada hakim Pengadilan Negeri sebelum memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut dalam persidangan. Dengan demikian, upaya mendamaikan harus dilakukan secara serius dan optimal melalui lembaga perdamaian.

Terciptanya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara sangat membantu proses persidangan. Sebab dengan adanya perdamaian proses pemeriksaan berjalan sederhana, cepat dan biaya ringan jika dibandingkan dengan putusan biasa yang berlarut-larut dan memerlukan biaya besar.

Di samping itu, dengan adanya perdamaian maka tujuan luhur perkawinan dapat dipertahankan. Hubungan suami isteri, anak-anak dan keluarga lainnya dapat terjalin kembali.

### ***C. Manfaat Perdamaian dalam Gugatan Perdata***

Menurut Abdul Manan, ada tiga manfaat yang dapat diperoleh jika perdamaian berhasil dilaksanakan, karena wujud perdamaian yang telah dibuat dalam bentuk putusan perdamaian, yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> E. S. Kristanti. (2010). *Status Hukum Terhadap Perkawinan Konghucu Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h.59.

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.168-172.

## **1. Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap**

Pasal 1851 KUHPerdara menegaskan tentang semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan.

Putusan perdamaian tersebut tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak telah dirugikan oleh putusan perdamaian itu.

Dalam Pasal 130 Ayat (2) *HIR* ditegaskan pula bahwa jika perdamaian dapat dicapai, maka pada waktu itu pula dalam persidangan dibuat putusan perdamaian dengan menghukum para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah mereka buat. Putusan perdamaian itu berkekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan sebagaimana putusan biasa lainnya.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan Majelis Hakim sama kedudukannya dengan putusan pengadilan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krada van gewijsde*). Putusan perdamaian dapat dibatalkan jika terjadi kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan, atau juga karena adanya penipuan atau paksaan dalam membuatnya.

Ketentuan tersebut adalah selaras dengan yang dikemukakan dalam Pasal 1861 KUHPerdara, dimana ditegaskan bahwa suatu putusan perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu adalah sama sekali batal. Dalam Pasal 1862 KUHPerdara juga ditegaskan bahwa suatu perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi putusan perdamaian hakim tersebut tidak

diketahui oleh pihak-pihak yang bersengketa atau salah satu dari mereka maka putusan perdamaian itu adalah batal.

## **2. Tertutup Upaya Banding dan Kasasi**

Putusan perdamaian itu adalah sama nilainya dengan putusan pengadilan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini menandakan terhadap putusan perdamaian itu tertutup upaya banding dan kasasi. Karena saat ditetapkan oleh hakim menjadi putusan perdamaian maka sudah melekat bahwa putusan perdamaian itu adalah pasti dan tidak ada penafsiran lagi, langsung dapat dijalankan kapan saja diminta oleh pihak-pihak yang melaksanakan perdamaian itu.<sup>20</sup>

Satu-satunya upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya putusan perdamaian itu adalah mengadakan perlawanan terhadap putusan perdamaian itu. Perlawanan itu bisa berbentuk *derden verset* (gugatan perlawanan) atau bisa berbentuk *partij verset* (perlawanan terhadap sita eksekusi). Jika yang menjadi objek putusan perdamaian itu bukan benda milik para pihak yang membuat persetujuan perdamaian tetapi benda milik orang lain, dalam hal seperti itu, bagi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan *derden verset* karena barang yang dicantumkan dalam putusan perdamaian itu miliknya.

## **3. Memiliki Kekuatan Eksekutorial**

Putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum mengikat, mempunyai kekuatan hukum eksekusi, dan mempunyai nilai pembuktian daripada putusan perdamaian itu adalah sama dengan putusan pengadilan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tingkat penghabisan.

---

<sup>20</sup> M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.22.

Adapun bentuk-bentuk putusan hakim yang biasa disebut putusan arbitrase ataupun vonis jika telah mempunyai kedudukan hukum tetap (*in kracht*) wajib dilaksanakan, misalnya Putusan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tinggi, Putusan Pengadilan Negeri dan lainnya.<sup>21</sup>

Dikatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah karena putusan perdamaian itu mengikat para pihak yang membuatnya juga mengikat pihak luar atau orang-orang yang mendapat hak dan manfaat daripadanya. Putusan perdamaian juga mempunyai kekuatan eksekusi karena putusan perdamaian itu dapat langsung dieksekusi apabila pihak-pihak yang membuat persetujuan perdamaian itu tidak mau melaksanakan persetujuan yang disepakati secara sukarela.

#### ***D. Syarat dan Bentuk Perdamaian***

##### **1. Syarat Perdamaian**

Menurut Abdul Manan bahwa merujuk pada ketentuan pasal 1851 KUHPerdara dan pasal 130 HIR serta Pasal 154 R.Bg dapat disimpulkan bahwa syarat suatu perdamaian, harus memenuhi 4 unsur, yaitu:

##### **a. Adanya Persetujuan Kedua Belah Pihak**

Persetujuan ini harus betul-betul murni datang dari kedua belah pihak dan tidak boleh ada paksaan dan pihak manapun termasuk dari mediator. Hal tersebut berarti dalam perjanjian perdamaian berlaku sepenuhnya unsur-unsur persetujuan sebagaimana disebut dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- 1) Adanya kata sepakat secara sukarela (*teostemming*).
- 2) Kedua belah pihak cakap membuat persetujuan (*bekwamnied*).
- 3) Objek persetujuan mengenai pokok perkara tertentu (*bepaalde onderwerp*).

---

<sup>21</sup> Jumadi, Jumadi. "Negara Hukum Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4.1 (2017): 68-82.

4) Berdasarkan alasan yang diperbolehkan (*Seorrlsofdeoorzaak*).

Dengan demikian, setiap perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak sebelum maupun di depan persidangan, majelis hakim tidak boleh menyimpang dari Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdara. Karena perjanjian yang telah dibuat para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi orang-orang yang membuatnya, yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda* yang berlaku secara universal.

Hal senada Sitti Nurjannah memaparkan bahwa setiap kesepakatan atau kontrak yang dibuat dan telah ditandatangani wajib dilaksanakan dengan prinsip itikad baik, dan itikad baik ini merupakan prinsip yang dihormati dalam berbagai sistem hukum di dunia ini.<sup>22</sup>

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa para pihak harus mematuhi isi perjanjian. Sebab itu dalam persetujuan perdamaian sama sekali tidak boleh mengandung unsur kekeliruan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*). Bahkan dalam pasal 1859 KUHPerdara dinyatakan bahwa putusan perdamaian dapat dibatalkan apabila terdapat kekhilafan tentang orangnya atau pokok perselisihannya.

#### b. Mengakhiri Sengketa

Perjanjian perdamaian yang dirumuskan harus dapat mengakhiri suatu sengketa yang sedang berlangsung. Apabila perjanjian perdamaian dilakukan di depan sidang pengadilan, para pihak dihukum untuk mematuhi isi perdamaian.

Karena perdamaian merupakan persetujuan kedua belah pihak, maka terhadap putusan perdamaian tersebut menurut ketentuan pasal 130 Ayat 3 HIR dan 154 Ayat 3 R.Bg, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan

---

<sup>22</sup> Sitti Nurjannah, "Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Melalui Choice Of Law." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2.2 (2016): 160-167.



banding atau kasasi. Proses selesai sama sekali dan seandainya suatu waktu diajukan kembali persoalan yang sama oleh salah satu pihak tersebut, maka gugatannya dinyatakan “*nebis in idem*”<sup>23</sup> dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima.

Apabila telah terjadi perdamaian dalam perkara perceraian, maka perkara itu harus dicabut, dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam praktek peradilan, yaitu:

- 1) Pencabutan tersebut cukup dicatat dalam berita acara persidangan dan kemudian perkara tersebut dicoret dari daftar perkara yang ada di peradilan.
- 2) Pencabutan tersebut tidak hanya dicantumkan dalam berita acara persidangan namun juga harus dibuatkan produk pengadilan berupa putusan atau penetapan.

Menurut Abdul Manan perlunya dibuatkan produk pengadilan berupa putusan atau penetapan tersebut agar dapat diketahui adanya *nebis in idem*. Pendapat tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 216/Sip/1953 tanggal 21 Agustus 1953 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian harus ditolak apabila antara suami isteri telah terjadi perdamaian dan apabila ditolak maka harus dibuatkan produk hukum berupa putusan atau penetapan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika dilihat, maka pendapat kedua yang banyak digunakan dalam Pengadilan.<sup>24</sup>

Putusan perdamaian yang dibuat oleh hakim langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) Pasal 1851 KUHPerdara menentukan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat oleh majelis hakim akan mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkatan

---

<sup>23</sup> *Nebis in idem* adalah seseorang tidak dapat dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

<sup>24</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, h.176.



penghabisan, yang berarti telah tertutup upaya hukum lain seperti banding atau kasasi.

Putusan perdamaian tidak bisa dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau alasan salah satu pihak dirugikan oleh putusan perdamaian itu. Dalam pasal 130 Ayat 2 *HIR* ditentukan pula bahwa jika perdamaian dapat dicapai, maka pada waktu itu pula dalam persidangan dibuat putusan perdamaian dengan menghukum para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah mereka buat atau sepakati.

#### c. Perdamaian Atas Sengketa yang Telah Ada

Dalam Pasal 1851 KUHPerdata dikemukakan bahwa syarat untuk dapat dijadikan dasar putusan perdamaian itu hendaklah persengketaan para pihak sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tetapi baru akan diajukan ke pengadilan sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya perkara di sidang pengadilan.

Sehubungan dengan tersebut di atas, pendapat sementara pihak yang mengatakan bahwa putusan perdamaian hanya dapat dilaksanakan dari sengketa yang sedang diperiksa di dalam sidang pengadilan adalah pendapat yang keliru.

Berdasarkan Pasal 1851 KUHPerdata di atas dapat dipahami bahwa perdamaian itu dapat lahir dari suatu sengketa perdata yang sedang diperiksa di pengadilan maupun yang belum diajukan ke pengadilan, atau perkara yang sedang tergantung di pengadilan sehingga persetujuan perdamaian yang dibuat oleh para pihak dapat mencegah terjadinya penumpukan perkara di pengadilan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, h.164.

d. Harus Tertulis

Dalam Pasal 1851 KUHPerdara juga telah ditentukan bahwa persetujuan perdamaian itu sah jika dibuat secara tertulis. Karena syarat ini sifatnya imperatif (perintah), maka perdamaian harus dilakukan secara tertulis sesuai dengan format yang telah ditentukan dihadapan pejabat yang berkompeten untuk itu dan tidak boleh diadakan secara lisan.

## **2. Bentuk Perdamaian**

Ditinjau dari segi bentuk persetujuan perdamaian yang dihubungkan dengan tingkat cara pembuatan persetujuan perdamaian itu sendiri, maka dapat dibedakan dua (2) bentuk persetujuan perdamaian, yaitu:

a. Putusan Perdamaian

Apabila pihak-pihak yang bersengketa mengadakan perdamaian terhadap suatu masalah yang disengketakan mereka membuat akta perdamaian secara tertulis. Para pihak yang bersengketa memohon kepada Majelis Hakim agar persetujuan perdamaian itu dikukuhkan dalam suatu keputusan yang disebut dengan putusan perdamaian.

Formulasi isi dari perjanjian perdamaian itu dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berperkata dituangkan dalam suatu akta, para pihak yang bersengketa menandatangani akta perdamaian tersebut.

Atas dasar perdamaian itulah hakim menjatuhkan putusan perdamaian sesuai dengan isi persetujuan itu dengan diktum menghukum kepada pihak-pihak untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian tersebut. Jika pihak-pihak berperkara mengajukan kepada hakim agar akta perdamaian yang telah dibuat oleh mereka dijatuhkan putusan perdamaian, dan ternyata akta perdamaian itu sudah ditanda

tangani oleh para pihak yang bersengketa, maka dalam hal ini hakim mengambil alih sepenuhnya isi perjanjian perdamaian itu dalam arti memuat seluruhnya dalam putusan perdamaian yang dibuatnya.

Hakim sama sekali tidak diperkenankan menambah, mengurangi atau mencoret satu katapun isi akta perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak yang telah melakukan perdamaian itu, melainkan harus diterima secara bulat. Jadi, dalam membuat putusan perdamaian itu haruslah terpisah dengan akta persetujuan perdamaian. Persetujuan damai dibuat sendiri oleh pihak yang bersengketa, baru kemudian persetujuan perdamaian itu diajukan pada pengadilan atau hakim menyidangkan perkara tersebut untuk dikukuhkan sebagai putusan perdamaian dengan memberikan titel eksekusi.

#### b. Akta Perdamaian

Suatu persetujuan disebut berbentuk akta perdamaian, jika persetujuan perdamaian terjadi tanpa campur tangan pengadilan atau hakim. Apa yang disengketakan para pihak sudah atau belum diajukan sebagai gugatan ke pengadilan. Jika sengketa sudah sampai ke pengadilan, kemudian di luar campur tangan pengadilan para pihak pergi ke notaris untuk membuat persetujuan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian, atas dasar itu pula para pihak yang mencabut perkara yang sudah diajukan ke pengadilan dan para pihak tidak meminta pengukuhan persetujuan perdamaian itu dalam bentuk putusan perdamaian, maka persetujuan perdamaian itu disebut akta perdamaian. Bentuk persetujuan damai yang dituangkan dalam akta perdamaian itu dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Adapun cara membuatnya sangat sederhana yaitu para pihak yang bersengketa merumuskan sendiri persetujuan itu dengan tujuan untuk mengakhiri sengketa yang

terjadi di antara mereka. Akta perdamaian ini dapat berbentuk akta autentik dan dapat pula dibuat dalam bentuk di bawah tangan. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan di kemudian hari, sebaiknya akta perdamaian itu dibuat dalam bentuk akta autentik agar isi dan tanda tangan tidak bisa dipungkiri.

Akta perdamaian yang dibuat tanpa campur tangan pengadilan, tidak dapat dieksekusi walaupun undang-undang tidak melarang membuat persetujuan dalam bentuk akta perdamaian yang dilakukan di luar campur tangan pengadilan. Asalkan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1851 Ayat (2) tentang kebolehan membuat persetujuan perdamaian asalkan dibuat dalam bentuk tertulis, sama sekali tidak ditentukan mesti harus dikukuhkan dengan putusan pengadilan atau mesti harus berbentuk akta autentik.

Persetujuan perdamaian adalah bentuk perjanjian tertentu yang sepenuhnya takluk pada asas-asas hukum perjanjian sebagaimana yang tersebut dalam buku tiga Bab ke delapan belas KUHPerdata.

Demikian juga yang tersebut dalam Pasal 154 *Recthsreglement Buitngesten* (*R.Bg*) di mana dalam Pasal ini hanya mengatur tentang tata cara membuat putusan perdamaian. Sedangkan apa yang tersebut dalam Pasal 130 *Herziene Indonesich Reglement (HIR)* lebih dititikberatkan pada nilai eksekusinya dan hal ini hanya diatur dalam satu Pasal saja.<sup>26</sup> Akta perdamaian yang dibuat di luar campur tangan pihak Pengadilan masih terbuka hak pada pihak untuk mengajukannya sebagai perkara di pengadilan apabila dianggap akta perdamaian itu merugikan pihaknya.

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h.298.

Hal ini disebabkan karena persetujuan yang dituangkan dalam akta perdamaian itu tidak mengakhiri sengketa. Ketentuan ini tidak mengandung asas *nebis in idem* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara.

Jika ternyata terjadi perdamaian, maka hakim berdasarkan perdamaian tersebut menjatuhkan putusannya (*acte van vergelijc*), yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi dan mentaati isi perdamaian yang disepakati.<sup>27</sup>

Dalam perkara penceraian jika terjadi perdamaian, maka perkara harus dicabut dan tidak dapat dibuat akta perdamaian beda dengan perdata umum dibuatkan akta perdamaian. Logikanya tidak dibuatkan akta perdamaian karena tidak mungkin dibuat persetujuan atau perjanjian yang melarang salah satu pihak meninggalkan kediaman, melarang melakukan penganiayaan.<sup>28</sup>

Apabila perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dilanggar oleh salah satu pihak, maka akta perdamaian tidak dapat di eksekusi, karena akibat perbuatan itu tidak mengakibatkan putusnya perkawinan, oleh karena itu apabila salah satu pihak mau bercerai lagi, maka harus mengajukan gugatan baru.

Menurut Abdul Manan, apabila terjadi perdamaian, maka perkara itu harus dicabut.<sup>29</sup> Dan hal ini ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu : (1) cukup dicatat dalam berita acara sidang dan perkara tersebut dicoret dari daftar perkara/register perkara. (2) tidak cukup dengan berita acara saja, tapi perlu dibuat satu produk penetapan atau putusan. Produk tersebut memudahkan untuk diketahui “*Nebis in idem*” dan perhitungan biaya perkara.

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta: Liberty, 1998), h.86-87.

<sup>28</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h.104.

<sup>29</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h.104

Sejalan dengan pandangan di atas, Chatib Rasyid menjelaskan bahwa untuk membedakan fungsi dan akibat hukum pencabutan perkara karena alasan damai, Chatib berpendapat harus melalui putusan hakim dan tidak cukup hanya dengan dicatat dalam berita acara.<sup>30</sup>

### ***E. Lembaga yang Berperan Melakukan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian.***

#### **1. Berlaku Umum (Bagi Muslim dan Non Muslim)**

##### **a. Majelis Hakim**

Lembaga peradilan dipandang oleh masyarakat sebagai simbol dari penegakan hukum menggambarkan tidak hanya di negara-negara yang beraliran Kontinental bahkan di negara-negara Anglo Saxon semisal Amerika Serikat.

Menurut Achmad Ali, pengadilan sering diidentikkan dengan hukum itu sendiri dan hakim adalah salah satu komponen yang dominan di pengadilan dalam penegakan hukum dan keadilan melalui putusannya. Dalam menegakkan hukum sehingga dapat memberikan pengayoman bagi masyarakat, sangat tergantung pada profesionalisme hakim, di samping juga aspek moral dan etika hakim, sehingga putusan yang dijatuhkan mengandung tiga hal esensial yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>31</sup>

Noor Syofa berpendapat di samping tiga hal tersebut juga harus diterima oleh para pihak, masyarakat dan juga ilmu pengetahuan.<sup>32</sup> Dengan demikian, hakim

---

<sup>30</sup> Chatib Rasyid, *Upaya Perdamaian dalam Sengketa Perceraian*, (Yogyakarta: Mimbar Hukum, 1994), h.50.

<sup>31</sup> Achmad ali, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Yasril Watampone, 1998), h.73.

<sup>32</sup> Noorshofa, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpera, 1996), h.65.



dituntut melihat akar masalah perkara yang diajukan kepadanya termasuk sengketa perceraian.

Kewajiban awal yang dilakukan oleh hakim dalam suatu proses perkara perceraian yaitu melakukan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Sejalan dengan hal tersebut menurut Sudikno Mertokusumo, pada hari persidangan yang telah ditetapkan (sidang I) kedua belah pihak datang menghadap dipersidangan maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka pada saat inilah hakim dapat berperan secara aktif sebagaimana yang dikehendaki perundang-undangan.<sup>33</sup>

Tetapi dengan lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2016 untuk keperluan perdamaian, sidang tidak dapat dilakukan sebelum dimediasi guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian.

Setelah dimediasi tetapi gagal kemudian perkara dilanjutkan dalam persidangan, apabila hakim menilai bahwa suami isteri masih ada harapan untuk hidup rukun kembali (damai) maka kendala-kendala yang dihadapi bisa di atasi dengan meminta bantuan kepada pihak/lembaga lain sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahwa selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan para pihak dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan sidang dan dapat meminta bantuan kepada pihak atau lembaga lain yang dipandang perlu. Pihak atau lembaga lain yang dimaksud dalam penjelasan pasal tersebut adalah BP-4 dan yang lainnya. Apabila upaya perdamaian telah dilakukan secara optimal oleh hakim tanpa atau dengan bantuan pihak/lembaga lain tidak berhasil, barulah hakim menjatuhkan putusan cerai.

---

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h.82.

Melihat tugas yang harus diemban hakim Pengadilan Negeri harus mempunyai kualifikasi tersendiri yang membedakannya dari hakim-hakim lain pada umumnya, mengingat Pengadilan Negeri sebagai sistem peradilan nasional mempunyai tugas dan fungsi menyelesaikan perkara-perkara hukum keluarga bagi Non Muslim.

#### b. Lembaga Mediasi

##### 1) Pengertian Mediasi

Dalam Pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 dijelaskan yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>34</sup>

Yang menjadi mediator adalah hakim atau pihak lainnya yang memiliki sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang lainnya yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung (Pasal 1 dan 2 PERMA No. 1 Tahun 2016) atau hakim yang tidak bersertifikat juga dapat menjalankan fungsi mediator apabila tidak ada atau sangat terbatas jumlah mediator yang mempunyai sertifikat (Pasal 13 Angka 2).

Berbeda dengan fungsi sebagai hakim, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa di antara para pihak, tetapi hanya membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para pihak di luar persidangan.

Asumsi mediator sebagai pihak ketiga tanpa kepentingan, akan mampu mengubah hubungan komplik dengan cara mempengaruhi tingkah laku para pihak

---

<sup>34</sup> Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

dengan memberikan pengetahuan atau informasi yang lebih efektif, dengan demikian mediator dapat membantu para pihak menyelesaikan konflik yang dihadapi.<sup>35</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa hakim yang telah mendapatkan sertifikat mediator ataupun tidak bersertifikat harus bersikap netral dalam proses perundingan dalam rangka penyelesaian sengketa guna membantu para pihak tanpa menggunakan cara memaksa atau memutus sebuah penyelesaian. Oleh karena itu, mediator wajib mentaati Pedoman Perilaku Mediator yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung (Pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2016).

Ketentuan tersebut sebagai salah satu langkah maju untuk memperkuat PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang dianggap belum optimal di pengadilan dan kelayakan sebagai mediator.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 menekankan kiranya para hakim diseluruh wilayah kedaulatan Indonesia lebih bersungguh-sungguh dengan mengoptimalkan upaya perdamaian, tidak dianggap sekadar formalitas belaka yang lebih menekankan tentang pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan yang dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan.

## 2) Jenis Perkara yang Wajib Menempuh Mediasi

Pada umumnya, semua sengketa perdata yang diajukan di pengadilan wajib menempuh upaya perdamaian termasuk bagi perkara perceraian yang diajukan oleh suami atau isteri, kecuali ditentukan lain oleh Mahkamah Agung (Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016), seperti perkara perkawinan yang tidak wajib diupaya damaikan antara lain sengketa mengenai pencegahan, penolakan pembatalan, dan pengesahan

---

<sup>35</sup> Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), h.201.

perkawinan (Pasal 4 angka (2) huruf d PERMA No. 1 Tahun 2016), akan tetapi tetap dapat diupayakan melalui mediasi sukarela.

### 3) Sifat Proses Mediasi

Bersifat tertutup artinya tidak perlu diketahui oleh pihak yang tidak terlibat dalam proses mediasi kecuali diinginkan oleh para pihak yang berperkara (Pasal 5 angka 1) dengan demikian laporan mediator kepada hakim pemeriksa mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidak berhasilan proses mediasi kepada hakim pemeriksa kepada hakim pemeriksa perkara tidak termasuk pelanggaran terhadap sifat tertutup mediasi.

### 4) Kewajiban Menghadiri Mediasi

Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 3 dianggap sebagai kehadiran langsung. Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah. Alasan sah sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 meliputi:

- a) Kondisi kesehatan yang terganggu sehingga tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- b) Di bawah pengampuan (kuratel);
- c) Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri;
- d) Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

### 5) Iktikad Baik Menempuh Mediasi

Iktikad baik harus terdapat pada semua pihak atau kuasa hukum dalam menempuh mediasi . Salah satu pihak atau para pihak dan kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal, diantaranya:

- a) Tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- b) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c) Ketidak hadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- d) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain;
- e) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

### 6) Biaya Mediasi

**Biaya jasa mediator** yaitu:

- a) Jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya;
- b) Biaya jasa mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

**Biaya pemanggilan para pihak** yaitu:

- a) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara;

- b) Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang;
- c) Dalam hal para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak;
- d) Dalam hal mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan peradilan agama.

Biaya lain-lain diluar biaya jasa mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya pemanggilan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

#### 7) Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau di tempat lain diluar pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Mediator hakim dan pegawai pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi diluar pengadilan. Mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim atau pegawai pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi bertempat di pengadilan. Penggunaan ruang mediasi pengadilan untuk mediai tidak dikenakan biaya.

#### 8) Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

Untuk mendukung pelaksanaan mediai di pengadilan, Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang diantaranya meliputi:

- a) Rencana kebijakan, pengkajian dan penelitian mediasi di pengadilan;
- b) Pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan mediasi di Pengadilan;



- c) Pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi mediasi terakreditasi;
- d) Penyebarluasan informasi mediasi;
- e) Pengembangan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang mediasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditetapkan dengan keputusan ketua Mahkamah Agung.

#### 9) Tahapan Tugas Mediator

Adapun tahapan tugas mediator meliputi:

- a) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b) Menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak;
- c) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
- e) Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya;
- f) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- g) Mengisi formulir jadwal mediasi;
- h) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;

- j) Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, dan bekerja sama untuk mencapai penyelesaian;
- k) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- l) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara;
- m) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara.

#### 10) Tahapan Pra Mediasi

Kewajiban hakim pemeriksa perkara, meliputi:

- a) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi;
- b) Kehadiran para pihak sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 berdasarkan panggilan yang sah dan patut;
- c) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara;
- d) Dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir;
- e) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan dan tidak menghalangi pelaksanaan mediasi;
- f) Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak;
- g) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada Ayat 6 meliputi:

(1) Pengertian dan manfaat mediasi;

- (2) Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses mediasi;
  - (3) Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan;
  - (4) Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
  - (5) Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.
- h) Hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak:
- (1) Memperoleh penjelasan prosedur mediasi dari hakim pemeriksa perkara;
  - (2) Memahami dengan baik prosedur mediasi; dan
  - (3) Bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik.
- i) Formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) ditandatangani oleh para pihak dan/atau kuasa segera setelah memperoleh penjelasan dari hakim pemeriksa perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara;
- j) Keterangan mengenai penjelasan oleh hakim pemeriksa perkara dan penandatanganan formulir penjelasan mediasi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.
- 11) Hak Para Pihak untuk Memilih Mediator
- a) Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan;
  - b) Jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator;

- c) Ketentuan lebih lanjut tentang daftar mediator sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung.

#### 12) Batas Waktu Pemilihan Mediator

- a) Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (7), hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
- b) Para Pihak segera menyampaikan Mediator pilihan mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- c) Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan;
- d) Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara dan pegawai pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis hakim pemeriksa perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat;
- f) Jika para pihak telah memilih mediator sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atau ketua majelis hakim pemeriksa perkara menunjuk mediator sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) atau Ayat (4), ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator;
- g) Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) kepada mediator melalui panitera pengganti;

h) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi.

Pasal 1 Ayat (6) menyatakan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Sedangkan Ayat (5) menyatakan mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Pasal 2 Ayat (1) berbunyi semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Bunyi dari Pasal tersebut dapat dipahami bahwa perkara perceraian yang diajukan oleh para pihak adalah termasuk kewajiban untuk lebih dahulu menyelesaikan dengan melalui upaya perdamaian dengan bantuan mediator.

Pasal 3 Ayat (2) adalah hakim wajib menunda proses persidangan perkara itu untuk memberikan kesempatan kepada pihak menempuh proses mediasi.

Pasal 6 Ayat (1) mediator pada setiap pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator.

Pasal 11 Ayat (1) jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak. Ayat (2) kesepakatan wajib memuat klausula pencabutan perkara atau pernyataan telah selesai.

Sejalan dengan hal tersebut, maka apabila tercapai perdamaian pada proses mediasi, maka persetujuan perdamaian menjadi sah (Vide Pasal 1851 KUHPperdata).

Dan apabila persetujuan dibuat secara tertulis cukup dengan akta di bawah tangan dengan ditanda tangani pihak-pihak yang berperkara.

Dengan berpedoman pada PERMA No. 1 2016, maka peran hakim dalam proses perdamaian adalah mempunyai peranan yang amat penting sehingga sengketa perceraian dapat diminimalisir.

## **2. Berlaku Khusus Bagi Orang Muslim**

### **a. Lembaga Badan Penasehatan Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP-4)**

BP-4 adalah suatu lembaga atau badan penasehat perkawinan, peselisihan dan perceraian.<sup>36</sup> Lembaga ini diresmikan berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 1961 dan dikuatkan berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 yang menegaskan bahwa BP-4 satu satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang penasehatan perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian. Badan ini dibentuk untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga untuk mengurangi perceraian.<sup>37</sup>

Badan ini terstruktur dari pusat sampai desa. Pasal 7 anggaran dasar 4 menyatakan: Di pusat Direktur Urusan Agama Islam dan Direktur Penerangan Agama Islam Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan I Haji serta Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama karena jabatannya menjadi ketua umum dan ketua BP-4 pusat.

Di Provinsi Kepala Bidang Urusan Agama Islam / Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam / Kepala Bidang Masyarakat dan Pembinaan Kelembagaan Agama

---

<sup>36</sup> Bisman, Bisman. *Efektivitas Kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian di Kecamatan Makassar*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015. h.10.

<sup>37</sup>



Islam Kantor Wilayah Departemen Agama masing- masing kerana jabatannya menjadi ketua BP-4 Provinsi.

Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kotamadya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN) karena jabatannya menjadi Ketua BP-4 Kecamatan dan Desa.

Unsur Peradilan Agama di daerah duduk dalam kepengurusan BP-4 setempat, dalam hal ini hakim pada Pengadilan Agama karena fungsinya adalah korp penasehat BP-4 setempat dan anggota lain yang terdiri dari organisasi wanita, tokoh masyarakat dan cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu dan profesi yang terkait.

Lembaga BP-4 bertujuan mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam. Sedangkan usaha untuk mencapai tujuan tersebut berdasarkan pasal 5 anggaran dasar BP-4 adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok.
- 2) Mencegah terjadinya perceraian (cerai talak atau cerai gugat sewenang-wenang, poligami yang tidak tanggung jawab, perkawinan di bawah umur dan perkawinan di bawah tanpan.
- 3) Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
- 4) Memberikan bimbingan dan penyuluhan Undang-Undang perkawinan dan hukum munakahat.

- 5) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- 6) Menerbitkan majalah, buku brosur dan penerbitan lain.
- 7) Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar dan kegiatan sejenis.
- 8) Meningkatkan penghayatan dan pengalaman ajaran Islam dalam rangka membina keluarga (rumah tangga) sehat bahagia dan sejahtera.
- 9) Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia, dan sejahtera. Dengan memperhatikan tujuan dan bidang garapan BP-4 tersebut, maka kedatangan suami isteri yang bermasalah itu atas dasar rekomendasi majelis hakim, tentulah akan lebih serius lagi diperhatikan oleh para pihak yang berperkara dan oleh BP-4 itu sendiri.

Adapun tugas BP-4 berdasarkan hasil Musyawarah Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2014 yang dipimpin oleh Ketua sidang Drs. H. Najib Anwar, MH dan Sekretaris sidang Dra. Hj. Nilmayetty, MM adalah menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.<sup>38</sup>

Organisasi BP-4 mempunyai bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan antara lain:

- 1) Bidang konsultasi/konseling, mediasi, advokasi dan penasehat perkawinan dan keluarga,
- 2) Bidang Pendidikan, pelatihan dan kursus.
- 3) Bidang kemitraan, kerjasama dan wirausaha.

---

<sup>38</sup> Bisman, Bisman. *Efektivitas Kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian di Kecamatan Makassar*. h.10.

4) Bidang Humas dan publikasi, dokumentasi.<sup>39</sup>

Sebelum lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2016, BP-4 masih terkadang berperan mendamaikan suami isteri yang bertikai tersebut setelah Mejlis Hakim terlebih dahulu berupaya socara optimal mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangannya.

Mengingat keterbatasan waktu maka apabila dalam sidang pertama upaya perdamaian belum berhasil dan hakim menilai bahwa suami isteri masih ada harapan hidup rukun kembali, maka hakim dapat memerintahkan kepada kedua belah pihak (suami isteri) untuk mendatangi BP-4 yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dan menunjuk BP-4 yang dimaksud sebagai mediator terhadap perkara tersebut dengan tenggang waktu yang disesuaikan dengan bobot persoalan yang ada.

Apabila upaya perdamaian telah dilakukan oleh BP-4, sehagai bukti dikeluarkannya surat permyataan / surat pengantar mengenai berhasil atau tidak berhasilnya upaya perdamaian kemudian disampaikan kepada Majelis Hakim (pasal 76 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1989) untuk ditindaklanjuti. Jika upaya perdamaian berhasil, maka perkaranya dicabut tetapi bila tidak berhasil barulah hakim memutuskan cerai.

Tetapi pada tahun 2019 BP-4 dianggap telah mati suri karena tidak berfungsi lagi sesuai dengan tugas yang di embannya. Perkembangan selanjutnya untuk memberdayakan BP-4 seiring dengan tingginya tingkat perceraian bagi kaum Muslim dan mencuatnya kewajiban memperoleh sertifikasi perkawinan bagi calon pasangan yang hendak menikah maka BP-4 pun diberdayakan kembali walaupun hanya sebatas

---

<sup>39</sup> Abdul Halim Talli. "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6.2 (2019): 133-146.

konseling pra nikah dalam bentuk pembekalan berupa *up grading* berupa kursus calon pengantin atau siscatin.

Hal ini selaras dengan penegasan dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dalam hal ini Muhajir Effendy bahwa pasangan yang hendak menikah akan diberikan bekal pengetahuan seputar Kesehatan reproduksi penyakit-penyakit yang mungkin terjadi dalam permasalahan suami isteri hingga masalah *stunting* pada anak.<sup>40</sup>

#### b. Lembaga Hakam

Kata hakam dalam kamus bahasa Arab yang berarti wasit, juri penengah.<sup>41</sup> Dalam al-qur'an dan terjemahannya arti hakam ialah juru pendamai.<sup>42</sup> Kata hakam dalam kamus hukum berarti wakil suami isteri dalam prosedur perceraian yang disebut *syigog*.<sup>43</sup>

Arti hakam berdasarkan penjelasan Pasal 76 Ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syigog* sementara pasal tersebut berbunyi:

Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang hakam atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pengangkatan hakam dilakukan setelah majelis hakim mendengar keterangan saksi atau dalam proses

---

<sup>40</sup> <https://www.kompasiana.com/edysupriatna/5dd5f807097f36783a5a35d2/balada-bp4-lembaga-urusan-nasihat-kawin-hingga-cerai-mati-suri?page=all>, Diakses 04 April 2020, Pukul 22.00 WITA.

<sup>41</sup> M. Kasir Ibrahim, *Kamus Arab-Indonesia dan Indonesia-Arab*, (Surabaya: UD. Apollo, 2011), h.825.

<sup>42</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*, h.84.

<sup>43</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), h.343.

pembuktian yang berarti proses perkara masih sedang berjalan, dan diangkat atau tidaknya hakim itu tergantung majelis hakim karena memang pasal tersebut hanya menyatakan hakim dapat mengangkat yang berkaitan dengan hakim, hal ini sesuai dengan yang telah ditegaskan oleh Allah dalam Q.S. An-Nisa (4): 35, yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>44</sup>

Fungsi hakim dalam pengadilan berjalan secara limtatif yaitu hanya perkara perceraian yang dengan alasan *syigog* (pertengkaran terus menerus). Hal ini jarang dilakukan mengingat lembaga hakim tidak bersifat imperatif (keharusan) melainkan bersifat fakultatif, terserah majelis hakim tentang perlu tidaknya mengangkat hakim.<sup>45</sup>

Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, secara lunitatif hanya memfungsikan lembaga hakim pada perkara perceraian karena alasan *syigog*. namun tidak pula secara eksplisit melarang menerapkannya pada perkara lain. Secara penafsiran analogi/pengibaratan (*acountrario*) berarti membolehkan penerapan lembaga hakim dalam bentuk perkara selain yang disebutkan dalam pasal tersebut.

---

<sup>44</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*, h.84.

<sup>45</sup> A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.85.



### BAB III

#### TINJAUAN TENTANG PERKARA PERCERAIAN

##### *A. Pengertian Perceraian*

Menurut KUHPerdara Pasal 207 perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.<sup>1</sup>

Sedangkan dalam ajaran Islam istilah perceraian berasal dari bahasa arab, yaitu *thalaq* dari kata *ithlaq* artinya melepaskan dan meninggalkan. Menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan suami istri. Melepaskan ikatan perkawinan adalah suatu bentuk perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istrinya dengan mengucapkan lafaz atau kalimat talak langsung dihadapan sang istri.<sup>2</sup>

Menurut C.S.T Kansil Perceraian adalah pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab tertentu dengan keputusan hakim.<sup>3</sup>

Sementara menurut P.N.H Simanjuntak perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan putusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Bmedia, 2017).

<sup>2</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia.2011), h.185.

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata: Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), h.107.

<sup>4</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), h.53.



## ***B. Alasan-Alasan Perceraian***

Dikarenakan tidak selamanya hubungan antara suami isteri itu selalu bahagia, tetapi terkadang suatu hubungan harus putus ditengah jalan yang disebabkan oleh beberapa alasan yang tidak bisa dihindari.<sup>5</sup>

Syarat perceraian diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Sedangkan alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara perceraian terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 junto Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 sebanyak enam (6) alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.23.

Dua butir alasan terakhir, merupakan tambahan dari empat alasan perceraian dalam KUHPerdata.

Diantara alasan-alasan perceraian tersebut di atas, menurut Andi Syamsu Alam bahwa realitas penyebab terjadinya perceraian di dominasi oleh berbagai faktor seperti zina, pemabuk, pemadat dan penjudi atau krisis akhlak, kawin paksa dan kecemburuan yang dipicu oleh faktor kurangnya rasa tanggung jawab dari suami atau isteri. Demikian pula sejak awal motivasi perkawinan di dominasi oleh hasrat biologis semata. Karena sejak awal sudah terjadi mentalitas yang salah (*error off mentality*).<sup>6</sup>

Tuntutan perceraian di pengadilan hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang tidak bersalah/terkena dengan alasan tersebut. Setelah hakim di pengadilan berupaya melakukan mediasi (*perdamaian-dading*) sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 39 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 junto Pasal 31 PP No.9 Tahun 1975 junto PERMA No.1 Tahun 2016.

### ***C. Akibat Hukum Perceraian***

Mengenai putusannya perkawinan karena perceraian dan akibat yang ditimbulkannya dalam UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan dalam pasal-pasal nya di bawah ini:

1. Pasal 37, Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
2. Pasal 41, Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:
  - a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

---

<sup>6</sup> Andi Syamsu Alam, *Reformasi Peradilan Agama di Indonesia*, (Makassar: Yapensi, 2004), h.73-74.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>7</sup>

#### ***D. Putusnya Perkawinan Selain Perceraian***

Selain perceraian, terdapat dua lainnya sebagai penyebab perpisahan antara suami dan isteri yang mengakibatkan putusnya perkawinan secara formal.

Dalam UU No.1 1974 dalam Pasal 38 ditegaskan putusnya perkawinan disebabkan oleh tiga hal meliputi kematian, keputusan pengadilan dan perceraian (telah diuraikan dalam Sub Bab A, B dan C). Berikut akan diuraikan sepintas tentang putusnya perkawinan karena kematian dan keputusan pengadilan sebagai berikut:

##### **1. Kematian**

Perpisahan antara suami dan isteri yang pisahkan oleh kematian tidak dapat di tolak maupun di hindari oleh manusia, hal ini ditegaskan oleh Allah Swt dalam Q.S. As-Sajadah (32):11, yang berbunyi:

قُلْ يَتُوفَنَكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah, “Malaikat maut yang disertai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada tuhanmu, kamu akan dikembalikan.”<sup>8</sup>

##### **2. Keputusan Pengadilan**

Orang yang dapat diberikan putusan pengadilan sebagai legalitas perpisahan antara suami dan isteri yaitu orang yang masuk kategori orang hilang.

Orang yang hilang ialah orang yang meninggalkan tempat selama 5 tahun tanpa kabar sama sekali. Keadaan “tidak ada di tempat” tidak menghentikan

---

<sup>7</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.66.

<sup>8</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h.415.

wewenang berhakanya seseorang, dengan demikian statusnya tetap sebagai *person* yang mempunyai kewenangan dalam hukum dalam perbuatan hukum tertentu. Akan tetapi keadaan seperti itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini merupakan salah satu penyebab pembuat undang-undang mengatur perihal “tidak ada di tempat”. Orang yang hilang kaitannya dengan harta bendanya, terbagi tiga (3) yaitu:<sup>9</sup>

- a. Orang yang hilang tanpa meninggalkan surat kuasa kepada orang lain untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka 5 tahun lewat harus dimintakan kepada hakim untuk memutuskan ia telah meninggal dunia.
- b. Apabila ia meninggalkan tempat dan menunjuk kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka nanti setelah 10 tahun barulah ia dapat dinyatakan telah meninggal dunia.
- c. Apabila yang tidak ada di tempat merupakan Anak Buah Kapal (ABK) atau penumpang kapal yang dinyatakan hilang atau mengalami kecelakaan, 1 tahun sudah dapat dimintakan persangkaan mati.

Setelah seseorang dinyatakan meninggal dunia, maka ada dua akibat hukum yang dapat terjadi yakni orang yang ditinggalkan (suami atau isteri) dapat kawin lagi dengan izin hakim.<sup>10</sup>

#### ***E. Pandangan Berbagai Agama Tentang Perceraian***

Pandangan enam agama yang diakui di Indonesia (Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965) yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1982), h.219.

<sup>10</sup> Istiqamah, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.115-116.

## 1. Pandangan Agama Islam

Alasan perceraian dalam ajaran Islam sesuai dengan alasan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 sebanyak enam alasan, dan ada dua alasan tambahan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 116 KHI yaitu:

- a. Suami melanggar *taklik thalak*;
- b. Peralihan agama atau murtad.

Jauh sebelumnya dalam Hukum Islam telah diatur tentang dibolehkannya terjadi perceraian sebagai jalan terakhir apabila tidak mampu lagi didamaikan sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat dibawah ini:

- a. Q.S. Al-Baqarah (2):227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>11</sup>

- b. Q.S. An-Nisa' (4):130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*, h.36.

<sup>12</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*, h.99.

Dengan demikian pada dasarnya ajaran Islam sangat membenci perceraian, tetapi apabila mudharatnya lebih besar daripada mamfaatnya ada ruang untuk memutuskannya demi kebaikan suami atau isteri tersebut.

## **2. Pandangan Agama Kristen**

Pandangan Kristen tentang perceraian merupakan akhir dari sebuah ikatan dimana pada awalnya diharuskan berjalan seumur hidup tetapi apabila pasangan sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan bersama sebagai sepasang suami isteri maka dapat diakhiri.

Adapun pengertian perceraian tidak hanya sebagai akhir dari hubungan antara dua insan antara suami dan isteri namun dalam artian yang luas meliputi anak, harta benda, serta Lembaga Gereja dan perintah Allah sendiri. Semua yang terlibat akan menanggung resiko dari perceraian tersebut yang pada umumnya menghasilkan konflik berkepanjangan yang menuju kehancuran baik yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung.

Bagi yang beragama Kristen dimungkinkan untuk melakukan perceraian karena alasan-alasan tertentu.<sup>13</sup> Misalnya tidak seiman dan juga karena zinah, sebagaimana yang tertera dalam Matius 19:9 yang berbunyi “Tetapi aku berkata padamu: Barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah”.

Tetapi pengertian zinah disini tidak bisa dijadikan alasan pembenar untuk mengadakan perceraian karena ajaran Kristen juga berpandangan bahwa perpisahan terjadi hanya dipisahkan oleh perbedaan keyakinan dan kematian. Dengan demikian, walaupun suami isteri telah sah secara sipil melakukan perceraian di pengadilan (sah

---

<sup>13</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestika Pustaka Publisher, 2006), h.138.



secara hukum negara) tetapi menurut ajaran agama Kristen pernikahan tersebut tidak terputus. Apabila mantan suami isteri tersebut telah kawin dengan orang lainnya maka dianggap mereka telah melakukan perzinahan menurut hukum agamanya.

Agak longgarnya pemahaman sebagian umat Kristen terhadap ayat Matius 19:9 tersebut, yang mempengaruhi perkembangan selanjutnya pada KUHPerdara yang mengalami pembaharuan sebagai pengaruh dari ajaran Kristen yang memungkinkan perceraian dengan beberapa alasan tertentu.<sup>14</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, pada prinsipnya pandangan Kristen juga sangat mempersulit perceraian, walaupun ada kelonggaran sedikit dibandingkan dengan Katolik.

### **3. Ajaran Agama Katolik**

Dalam ajaran Katolik yang mengenal sistem perkawinan monogami absolut, pada umumnya memandang perkawinan sebagai suatu lembaga yang abadi, sehingga bubarnya perkawinan hanya dipisahkan oleh kematian. Dengan kata lain, bahwa bagi yang beragama Katolik, maka perceraian berdasarkan hukum Gereja selain karena kematian tidak dimungkinkan.<sup>15</sup>

Asas monogami dalam perkawinan menurut agama Katolik terlihat dari substansi perceraian tersebut dalam Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, h.138.

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, h.138.

<sup>16</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), h.9.

Pasal tersebut menegaskan dalam keadaan apapun suami isteri tidak dapat melakukan perceraian. Walaupun perkembangan selanjutnya sudah membolehkan perceraian tetapi dengan izin atau berupa dispensasi dari pihak Uskup Paus Paulus di Vatikan Roma. Sebagaimana dikemukakan oleh Al Purwa Hardiwardoyo bahwa:

Dalam prakteknya kekuasaan menceraikan perkawinan hanya diberikan oleh hukum gereja kepada Paus di Roma, terutama bila perkawinan menyangkut perkawinan yang telah disahkan secara Katolik baik diantara dua orang Kristen maupun antara seorang Kristen dan seorang bukan Kristen, Uskup hanya diberi kekuasaan untuk mengizinkan perkawinan dari perkawinan non gerejawi antara dua orang bukan Kristen berdasarkan *privilege* Paulus.<sup>17</sup>

Pasangan suami isteri Katolik yang hendak bercerai harus melewati dua sidang gereja yang dalam prakteknya proses persidangan sangat rumit, sangat lama dan memerlukan banyak biaya, karena pasangan suami isteri yang hendak membubarkan perkawinannya memerlukan bantuan ahli untuk membimbing mereka dan jauhnya negara penentu pengesahan perceraian yaitu Paus yang berada di Roma.

Seiring dengan perkembangan zaman, Paus Fransiskus secara radikal membentuk komisi untuk menyederhanakan prosedur perceraian dan pernikahan kembali bagi umat Katolik di gereja pada tahun 2014.

Paus Fransiskus mengatakan: “Tidaklah adil bagi pasangan jika harus lama ditekan oleh “kegelapan keragu-raguan ketika menanti keputusan” mengenai upaya perceraian mereka”.<sup>18</sup>

Dengan adanya reformasi 2014 tersebut, maka prosedur pengesahan perceraian dapat hanya melalui satu kali sidang (yang berarti mengurangi biaya) dan memungkinkan Uskup mengabulkan permohonan perceraian secara langsung apabila suami isteri memintanya.

---

<sup>17</sup> Al Purwa Hardiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h.48.

<sup>18</sup><https://internasional.kompas.com/read/2015/09/09/02021161/Paus.Fransiskus.Sederhanakan.Perceraian.Katolik>, Diakses 06 Mei 2020, Pukul 12.30 WITA.

#### 4. Ajaran Agama Hindu

Dalam ajaran agama Hindu perceraian juga pada dasarnya dilarang tetapi dimungkinkan apabila suami atau isteri berkhianat dan tidak setia. Itupun tergantung pada konteksitas terhadap pelanggaran *Satyeng Lhaki* atau *Satyeng Wadon* menurut *Reg Weda* sudah sangat salah kalau kita bercerai atau berpisah karena sudah melanggar *Yadnya* yang sangat susah dilakoni secara materil, moril dan spiritual.

Dengan demikian, apabila isteri melanggar *Dresta* (adat), agama serta norma hukum formal menurut *Nitisastra* seharusnya dibuang, justru dipelihara kita akan semakin berdosa. Karena Masa lalu dan hari ini adalah sebuah kenyataan akumulasi dari karma atau perbuatan sebagai pelajaran pada masa kini.<sup>19</sup>

Berdasarkan pandangan di atas, bahwa dimungkinkan terjadinya perceraian pada ajaran agama Hindu hanya karena alasan-alasan tertentu.

#### 5. Ajaran Agama Buddha

Di dalam agama Buddha tidak diajarkan sama sekali tentang perceraian, yang ada hanyalah perceraian dengan alasan keagamaan misalnya seorang suami ingin menjadi *anagarika*, *samanera*, atau menjadi *bhikkhu* dan diizinkan oleh istrinya dan begitu pula sebaliknya. Yang pasti terjadi adalah perceraian itu terjadi apabila salah satu dari suami isteri meninggal dunia.<sup>20</sup>

Tetapi dalam prakteknya alasan perceraian penganut Buddha mengacu pada ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1974.

---

<sup>19</sup> <https://dharmaid.id/perceraian-dalam-pandangan-hindu/>, Diakses 04 Mei 2020, Pukul 21.30 WITA.

<sup>20</sup> <http://bluelotus4happiness.blogspot.com/2009/12/perceraian-dalam-buddhisme.html>, Diakses 04 Mei 2020, Pukul 20.50 WITA.

## 6. Ajaran Agama Konghucu

Menurut kitab suci Konghucu, pernikahan adalah manautkan dua keturunan yang berbeda marga dan berbeda etnis atau bangsa yang dipersatukan, maka pernikahan itu adalah sakral dan suci. Tetapi terkadang dalam perjalanan rumah tangga terjadi konflik dimana suami dan isteri tidak dapat secara rukun dan damai yang diakibatkan karena salah satu pihak melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kondisi fisik salah satu pihak dan salah satunya menghendaki kawin lagi. Apabila terdapat salah satu dari alasan tersebut otomatis harus harus diceraikan walaupun perceraian dalam agama Konghucu memang disesalkan.<sup>21</sup>

Pandangan dari berbagai agama tersebut, menunjukkan bahwa perceraian atau *thalak* merupakan sebuah jalan terakhir yang boleh ditempuh jika kondisi rumah tangga sudah kacau dan tidak bisa dipertahankan lagi atau apabila dipertahankan justru menimbulkan mudharat yang lebih besar terhadap suami isteri atau anaknya. Oleh karena itu, perceraian harus dipersulit dan merupakan pintu darurat yang bisa ditempuh bila sudah tidak ada solusi pemecahannya.

Dengan demikian, suatu perceraian tidak diperkenankan dilakukan atas dasar persetujuan antara suami isteri yang tidak didukung oleh alasan yang dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku di negara ini.

---

<sup>21</sup> <https://zonautara.com/2018/04/04/yosadi-perceraian-terjadi-jika-ada-kegentingan-memaksa/>, Diakses 04 Mei 2020, Pukul 21.55 WITA.

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP UPAYA PERDAMAIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN NON MUSLIM

#### *A. Gambaran Singkat Tentang Pengadilan Negeri*

Pengadilan Negeri pada masa kolonial Hindia Belanda disebut *landraad*. Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Perkara perceraian termasuk dalam ranah keperdataan. Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan antara orang yang satu dengan yang lainnya mengenai hak dan kewajiban dan larangan dalam lapangan keperdataan seperti penjanjian jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, simpan pinjam, pinjam pakai, perjanjian untung-untungan, sewa beli, hak jaminan atas benda (hak tanggungan, gadai, hipotik, fidusia) dan termasuk juga sengketa dalam lapangan hukum keluarga dan hukum waris bagi orang-orang Non Muslim (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu serta aliran kepercayaan yang kepercayaan yang terdaftar di Kemendagri) seperti pemutusan hubungan perkawinan, pembagian harta bersama, hak asuh anak, perwalian anak dibawah umur dan sebagainya.

Susunan organisasi Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Pantera, Sekretaris, dan Jurusita.

Daerah hukum Pengadilan Negeri tersebar diseluruh wilayah Indonesia yang meliputi kabupaten dan kota.

Adapun Jumlah Pengadilan Negeri yang tersebar diseluruh wilayah provinsi di Indonesia sebanyak 351 PN, sedangkan jumlah Pengadilan Tinggi Negeri sebanyak 30 PTN dengan rincian sebagai berikut: <sup>1</sup>

No	Provinsi	Jumlah Pengadilan Negeri	Kedudukan Pengadilan Tinggi Negeri
1	Aceh	19	Banda Aceh
2	Sumatra Utara	18	Medan
3	Sumatra Barat	15	Padang
4	Riau dan Kep. Riau	14	Pekanbaru
5	Jambi	10	Jambi
6	Sumatra Selatan	9	Palembang
7	Bengkulu	8	Bengkulu
8	Lampung	10	Tanjung Karang
9	Kep. Bangka Belitung	3	Pangkalpinang
10	DKI Jakarta	5	Jakarta
11	Jawa Barat	21	Bandung
12	Jawa Tengah	35	Semarang
13	DI Yogyakarta	5	Yogyakarta
14	Jawa Timur	35	Surabaya
15	Kalimantan Selatan	11	Banjarmasin
16	Kalimantan Tengah	8	Palangkaraya
17	Kalimantan Barat	10	Pontianak
18	Kalimantan Timur	12	Samarinda
19	Sulawesi Utara	8	Manado

<sup>1</sup> [http://pn-pasarwajo.go.id/?page\\_id=2214](http://pn-pasarwajo.go.id/?page_id=2214), diakses 27 Mei 2020 Pukul 19.44 WITA.



20	Gorontalo	4	Gorontalo
21	Sulawesi Tengah	7	Palu
22	Sulawesi Selatan dan Barat	26	Makassar
23	Sulawesi Tenggara	7	Kendari
24	Bali	8	Denpasar
25	Nusa Tenggara Barat	6	Mataram
26	Nusa Tenggara Timur	16	Kupang
27	Maluku	4	Ambon
28	Maluku Utara	4	Ternate
29	Banten	4	Banten
30	Papua	10	Jayapura
31	Tambahan Pengadilan Negeri	30	Surat KememPan-RB No. B/150/M.KT.01/2018
Jumlah		352 PN	30 PTN

Untuk seluruh peradilan dalam lingkup Mahkamah Agung jumlah peradilan sebanyak 910 dengan rincian sebagai berikut:<sup>2</sup>

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah
1	Peradilan Umum	412
2	Peradilan Agama (Termasuk Mahkamah Syar'iyah)	441
3	Peradilan Tata Usaha Negara	34
Jumlah		910

Terkait dengan perkara perceraian berdasarkan penelusuran peneliti melalui repository, situs, website di berbagai Pengadilan Negeri, hasil penelitian dalam bentuk tesis atau skripsi dan jurnal-jurnal ilmiah serta lainnya yang berhasil dihimpun secara online walaupun data yang didapatkan masih sangat terbatas.

<sup>2</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3365/era-baru-menuju-badan-peradilan-yangmodern#:~:text=Dengan%20terbentuknya%2085%20pengadilan%20baru,empat%20lingkungan%20peradilan%20saat%20ini>, Diakses 26 Mei Pukul 20.13 WITA.

Data perceraian yang terdaftar dan berhasil atau gagal diupayakan perdamaian tergambar dalam table dibawah ini:

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Perceraian Masuk							Jumlah Perkara Perceraian Berhasil di Damaikan						
		Tahun							Tahun						
		2010-2011	2012-2014	2015	2016	2017	2018	2019	2010-2011	2012-2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Semarang <sup>3</sup>			277	179						6	4			
2	Bogor <sup>4</sup>	143							0						
3	Makassar <sup>5</sup>	89	96						7	8					
4	Sungguminasa					13	8	15					0	0	0
5	Denpasar <sup>6</sup>	1091	19						28	2					
6	Kupang <sup>7</sup>							60							3
7	Yogyakarta <sup>8</sup>					78	84	51					18	10	0
8	Balige <sup>9</sup>			20	21	31	10				0	0	0	0	
9	Bengkalis <sup>10</sup>				3	17						0	0		
10	Manado <sup>11</sup>							411							0
11	Jayapura <sup>12</sup>						79	79						0	0
Jumlah		1323	115	297	203	139	181	616	35	10	6	4	18	10	3

<sup>3</sup> Arum Kusumaningrum and Benny Riyanto Yunanto. "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang." *Diponegoro Law Journal* 6.1 (2017): 1-10.

<sup>4</sup> Ermi Suryani "Perceraian Muslim dan Non Muslim (Studi Kasus di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor)." *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI*

<sup>5</sup> Restami Milana. *Efektivitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2015*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

<sup>6</sup> Indriati Amarini. "Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan." *Kosmik Hukum* 16.2 (2017).

<sup>7</sup> <https://kumparan.com/florespedia/60-perkara-perceraian-didaftarkan-ke-pn-kupang-di-awal-tahun-2019-1qzFjmOJh6J>, diakses 26 Mei 2020 Pukul 14.29 WITA.

<sup>8</sup> Trisya Azzahra. *Penerapan Aturan Iktidak Tidak Baik Dalam Mediasi di Pengadilan Negeri (Studi Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2019.

<sup>9</sup> Bernhardt Siburian. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017." *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 1.1 (2019): 31-39.

<sup>10</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/677418/kasus-perceraian-non-muslim-di-bengkalis-meningkat-tajam>, Diakses 26 Mei Pukul 15.30 WITA.

<sup>11</sup> <https://manado.tribunnews.com/2019/12/03/kasus-perceraian-di-manado-semakin-meningkat-kultur-di-sulut-membantu-perempuan-buka-suara>, Diakses 26 Mei 2020 Pukul 15.35 WITA.

<sup>12</sup> <https://kumparan.com/bumi-papua/sepanjang-2019-79-pasutri-di-kota-jayapurabercerai1sbN4HjapC#:~:text=Jayapura%2C%20BUMIPAPUA.COM%20%2D%20Sepanjang,g.sama%20tercatat%20pada%20tahun%20sebelumnya>. Diakses 26 Mei 2020 Pukul 15.50 WITA.

Data di atas menunjukkan bahwa mediasi sebelum dan sesudah lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2016 tetap statis, yang berarti upaya perdamaian tetap lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil didamaikan. Hal ini juga didukung dengan penuturan Suryono yang berkecimpung di Pusat Mediasi Indonesia, beliau menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi di Indonesia di bawah 5% karena kurang pahamnya masyarakat tentang nilai luhur musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah.<sup>13</sup> Menurut peneliti, melemahnya nilai musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan perkara perceraian karena seiring dengan budaya individualis yang lebih mementingkan ego pribadi daripada kepentingan keluarga sendiri dan pasangan. Karena masing-masing suami atau isteri telah mempunyai luka bathin yang timbul dari konflik rumah tangga yang tidak mudah dihilangkan begitu saja, karena terkait dengan perasaan dan harga diri.

Minimnya jumlah mediator diberbagai Pengadilan sebagai contoh jumlah mediator diseluruh Indonesia hanya 1.102 yang tersebar pada 910 peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama Dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berarti  $1.102/910 = 1,21$  orang, berarti rata-rata tiap pengadilan hanya mempunyai 1 mediator, itupun apabila dibagi secara rata. Karena kenyataannya ada pengadilan yang berkedudukan di ibukota provinsi yang mempunyai lebih dari 1 mediator yang berarti ada pengadilan yang tidak memiliki mediator bersertifikat.

### ***B. Analisis Pelaksanaan Upaya Perdamaian Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri***

Proses mediasi dalam pelaksanaannya terhadap perkara perceraian pasangan Non Muslim di seluruh Pengadilan Negeri juga mengacu pada PERMA No. 1 Tahun

---

<sup>13</sup> <https://ugm.ac.id/id/berita/4759-penyelesaian-sengketa-dengan-mediiasi-di-indonesia-rendah>, Diakses 29 Mei 2020, Pukul 14.00 WITA.

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Semua jenis perkara perdata yang masuk khususnya perkara perceraian haruslah terlebih dahulu melalui upaya perdamaian atau mediasi.

Adapun praktek pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Penetapan Mediator**

Dalam Pasal 19 Ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 ditentukan bahwa para pihak dapat memilih mediator yang terdapat dalam daftar mediator di Pengadilan Negeri tempat perkara diajukan.

Dengan demikian, secara teknis sebelum melakukan mediasi, ada proses yang harus ditempuh yaitu penentuan mediator. Pertama ketika para pihak yaitu penggugat dan tergugat harus hadir saat sidang pertama, dan pada hari itu juga atau paling lama dalam waktu 2 hari setelahnya (Pasal 20 Ayat 1), menentukan atau memilih mediator yang telah disiapkan dalam daftar mediator di Pengadilan Negeri. Apabila para pihak tidak sepakat atau tidak mau memilih mediator yang ada, maka hakim dapat menunjuk mediator yang ada di pengadilan. Pada umumnya di seluruh Pengadilan Negeri terdapat beberapa pengadilan yang belum mempunyai mediator diluar pengadilan, jadi hanya hakim sendiri yang bertindak sebagai mediator.<sup>14</sup>

Berdasarkan penelusuran peneliti di website, Pengadilan Negeri Kabanjahe para pihak mediator memilih mediator dalam waktu 1 hari apabila tidak memilih pada waktu tersebut maka majelis hakim menetapkan mediator dari para hakim.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> <http://sbmi.or.id/2019/12/mengenal-perma-no-1-tahun-2018-tentang-mediasi/>, Diakses 28 Mei 2020 Pukul 13.11 WITA.

<sup>15</sup> <https://www.pn-kabanjahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi.html>, Diakses 28 Mei Pukul 15.00 WITA.

Selanjutnya, setelah para pihak hadir lalu setelah ditentukan siapa mediatornya maka para pihak menghubungi mediator untuk penentuan waktu dalam melakukan mediasi.

Berdasarkan pemaparan di atas maka pelaksanaan penetapan mediator telah berjalan sesuai dengan aturan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Dimana para pihak diberi kesempatan untuk memilih mediator tetapi pada umumnya karena ketidaktahuan masyarakat tentang siapa mediator yang dapat mendampingi, maka pengadilan yang menunjuk langsung mediator tersebut.

## **2. Pemanggilan Para Pihak yang Berperkara**

Dalam Pasal 21 PERMA No. 1 Tahun 2016 diatur tentang pemanggilan para pihak sesuai dengan hari dan tanggal penentuan mediasi oleh mediator. Apabila mediasi dilakukan di dalam gedung pengadilan maka pemanggilan dilakukan oleh panitera dengan bantuan juru sita atas instruksi mediator sebagai kuasa hakim pemeriksa perkara.

## **3. Kewajiban Menghadiri Para Pihak yang Berperkara**

Berdasarkan Pasal 6 para pihak “wajib menghadiri secara langsung” proses mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya.

Kalimat dalam tanda kutip tersebut di atas menandakan bahwa tidak ada alasan bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian untuk tidak datang menghadiri mediasi baik selaku penggugat maupun tergugat, kecuali dengan alasan yang dapat diterima seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir disertai dengan surat keterangan dokter yang terpercaya, sedang dibawah pengampunan, berdomisili atau berkedudukan diluar negeri, sedang menjalankan tugas negara, tuntutan profesi



atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.<sup>16</sup> Hal ini berbeda dengan Pasal 7 Ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2008 yang masih mentolerir ketidakhadiran tergugat dalam proses mediasi.

Karena apabila salah satu dari para pihak berhalangan hadir dalam Pasal 6 Ayat 2 telah diberikan kemudahan untuk menggunakan media audio visual jarak jauh seperti *video call*, *zoom*, *skype* dan sebagainya. Penggunaan media tersebut dianggap sama dengan kehadiran langsung karena memungkinkan para pihak untuk saling melihat dan mendengar secara langsung. Orang yang tidak menggunakan media tersebut dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai iktikad baik untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara perceraian.

#### **4. Proses Mediasi**

Dalam Pasal 24-31 PERMA No. 1 Tahun 2016 diatur tahap-tahap pelaksanaan mediasi yang dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam satu forum. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian. Apabila menemukan butir kesepakatan maka merumuskan keputusan, mencatat serta menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi, tetapi apabila gagal maka mediator wajib memberitahukannya kepada hakim pemeriksa secara tertulis.

---

<sup>16</sup> <https://www.hukumonline.com/index.php/komentar/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016/>, Diakses 28 Mei 2020 Pukul 20.20 WITA.



Hakim pemeriksa setelah menerima pemberitahuan tentang kegagalan mediasi harus menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Secara normatif memang di PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur untuk mengajukan resume, mengajukan kaukus<sup>17</sup> dan sebagainya. Tetapi, karena biasanya masyarakat akan lebih dibebani oleh biaya perkara apabila dilakukan secara normatif, maka yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri yakni dengan melaksanakan mediasi di hari persidangan pertama dan langsung melakukan mediasi di pengadilan.

Kaukus tersebut bersifat kasuistis, maksudnya apabila mediator merasa membutuhkan kaukus maka akan diadakan namun apabila mediator tidak membutuhkannya maka tidak perlu kecuali perkara yang berat misalnya harta bersama karena itu dibutuhkan pendalaman perkara tentang asal-usul harta tersebut.<sup>18</sup> Setelah maksimal 30 hari, biasanya dalam persidangan sudah diberitahukan kapan sidang selanjutnya akan dilanjut dan tidak ada panggilan relas lagi.

Dengan demikian, proses mediasi telah berjalan secara formal di Pengadilan Negeri.

## **5. Jangka Waktu Penyelesaian Mediasi Maksimal 30 Hari**

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 6 proses mediasi dilakukan paling lama 30 hari. Hal ini menandakan bahwa batas proses mediasi lebih singkat dibandingkan dengan proses mediasi yang terdapat pada PERMA sebelumnya yaitu Pasal 13 Ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2008 yang menetapkan 40 hari.

---

<sup>17</sup> Kaukus adalah pertemuan mediator dengan salah satu pihak.

<sup>18</sup> Yogi Wahyudi. *Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)*. Diss. IAIN Metro, 2020.

Berdasarkan penelusuran peneliti dari berbagai website Pengadilan Negeri di Indonesia. Jangka waktu proses mediasi di Pengadilan Negeri Bandung, sepakat atau tidak sepakat adalah 22 hari sedangkan untuk mediasi di luar pengadilan jangka waktunya 30 hari.<sup>19</sup> Sedangkan di Pengadilan Negeri Makassar maksimal 25 hari.<sup>20</sup> Sementara di Pengadilan Negeri Blangkejeren masa mediasi setelah melewati 30 hari apabila ada kesepakatan antara para pihak maka dapat diperpanjang lagi 30 hari terhitung sejak berakhirnya masa mediasi pertama.<sup>21</sup>

### ***C. Analisis Faktor-Faktor yang Menghambat Upaya Perdamaian Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri***

Untuk memahami suatu aturan dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh masyarakat, termasuk upaya perdamaian perkara perceraian bagi orang-orang Non Muslim di Pengadilan Negeri. Dengan mengacu pada teori Lawrence M. Friedman bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum yang diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Substansi Hukum**

Bila ditinjau dari aspek substansi hukumnya yang mengatur tentang upaya perdamaian, bukan menjadi penyebab tidak optimalnya upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian Non Muslim yang diajukan di Pengadilan Negeri, karena telah terdapat perintah untuk mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian Non Muslim baik dalam peraturan yang khusus seperti yang telah diatur dalam Pasal 39 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 . Sedangkan

---

<sup>19</sup> <https://pn-bandung.go.id/hal-alur-mediasi.html>, Diakses 28 Mei jam 14.00 WITA.

<sup>20</sup> <http://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/prosedur-sederhana>, Diakses 28 Mei 2020 Pukul 14. 05 WITA.

<sup>21</sup> <http://pn-blangejeren.go.id/link/201602201023242499956c8308c8e126.html>, Diakses 28 Mei 2020 Pukul 14.15 WITA.

perintah mediasi yang berlaku secara umum terdapat dalam Pasal 16 Ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009, *HIR* Pasal 130 Ayat 1-3 dan *R.Bg* Pasal 154 Ayat 1-3 serta PERMA No. 1 Tahun 2016 yang merupakan petunjuk teknis penyelenggaraan mediasi.

Dari aspek substansi hukum telah terdapat perintah untuk mendamaikan seoptimal mungkin perkara perceraian bagi orang-orang Non Muslim di Pengadilan Negeri. Dengan didukung oleh keluarnya berbagai Peraturan Mahkamah Agung seperti PERMA No. 2 Tahun 2003 kemudian diperbaharui dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 kemudian perkembangan terakhir untuk menutup kekurangan dari Perma sebelumnya dikeluarkanlah PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Adapun perbedaan dari PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, dari berbagai segi:

a. Jangka Waktu Batas Penyelesaian

PERMA No. 1 Tahun 2016 jangka waktu penyelesaian 30 hari (dapat diperpanjang 30 hari berikutnya<sup>22</sup>), sedangkan PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah 40 hari (dapat diperpanjang maksimal 14 hari berikutnya<sup>23</sup>). Penetapan batas waktu mediasi pertama dimaksudkan supaya pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi dapat sungguh-sungguh menyelesaikan perundingan tersebut dan perpanjangan hari juga memberi harapan para pihak untuk dapat didamaikan.

b. Para Pihak Wajib Mengikuti Sidang Mediasi Secara Langsung

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 para pihak yaitu penggugat maupun tergugat wajib mengikuti sidang mediasi secara langsung tanpa diwakili oleh kuasa hukumnya. Hal ini membedakannya dengan PERMA sebelumnya. Karena ketidakhadiran secara langsung di tempat mediasi dapat diganti dengan kehadiran secara online dengan

---

<sup>22</sup> Pasal 24 Ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2016

<sup>23</sup> Pasal 13 Ayat 4 PERMA No. 1 Tahun 2008

menggunakan media audio visual. Karena selama ini ketidakhadiran para pihak di sidang mediasi disebabkan oleh berbagai alasan seperti kesibukan, kekurangan dana, kurang waktu sehingga tidak dapat meninggalkan tempat kegiatannya.

Itulah salah satu pertimbangan dalam PERMA yang baru ini mengakomodir penggunaan media audio visual dalam sidang mediasi. Karena penggunaan media audio visual tersebut juga dapat mengikuti, melihat, mendengarkan proses mediasi tersebut. Jadi, penggunaan media audio visual dianggap hadir secara langsung di tempat.

#### c. Iktikad Baik Dalam Proses Mediasi

Hal yang paling baru dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yakni terdapat dalam Pasal 7 yang mengatur tentang iktikad baik dari para pihak untuk menempuh mediasi.

Yang masuk kategori tidak mempunyai iktikad baik apabila salah satu pihak tidak hadir selama 2 kali berturut tanpa alasan yang sah, menghadiri pertemuan mediasi pertama tetapi tidak hadir pada pertemuan berikutnya, ketidakhadiran berulang-ulang (karena kehadiran juga dilakukan secara online), menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan dan tidak menanggapi resume perkara dari pihak lain dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

Sanksi yang didapatkan apabila salah satu atau para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik yaitu:

- 1) Penggugat yang tidak beriktikad baik maka gugatannya tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa dan dikenai kewajiban membayar biaya mediasi (Pasal 22 Ayat 1 dan 2) yang dapat diambil dari panjar biaya perkara atau dibayar sendiri oleh penggugat (Pasal 22 Ayat 5);

- 2) Tergugat yang tidak beriktikad baik maka dikenakan kewajiban untuk membayar biaya mediasi (Pasal 23 Ayat 1) yang diambil dari tergugat apabila dimenangkan dalam putusan sedangkan biaya perkara dibebankan pada pihak yang kalah (Pasal 23 Ayat 5);
- 3) Penggugat dan tergugat sama-sama tidak beriktikad baik maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan tidak dikenai hukuman biaya mediasi (Pasal 23 Ayat 8).

Berdasarkan pemaparan di atas maka persoalan iktikad baik dari para pihak berikut sanksinya merupakan salah satu perubahan yang fundamental dalam PERMA ini.

#### d. Faktor Biaya

Berdasarkan Pasal 8 PERMA No. 1 Tahun 2016 biaya jasa mediator yang berasal dari hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya sama sekali. Apabila, mediator berasal dari non hakim dan bukan pegawai pengadilan ada biaya yang harus dikeluarkan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Yang berarti khusus masalah perceraian para pihak yang berperkara dimudahkan dari segi biaya karena tidak dibebani dengan pembayaran untuk menempuh mediasi sepanjang dilakukan di dalam gedung pengadilan.

## **2. Struktur Hukum**

Dilihat aspek struktur hukum ada beberapa hal yang mempengaruhi berhasil atau tidak berhasilnya upaya perdamaian perkara perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri, sebagai berikut:



a. Penegak Hukum (Mediator)

1) Keahlian Mediator dalam Memediasi.

Teknik mediasi adalah metode atau cara mediator guna mengondisikan suasana pada saat mediasi berlangsung. Mulai dari mempertemukan pihak-pihak yang berperkara, menanyakan permasalahan atau konflik yang terjadi sampai dengan menemukan kesepakatan yang berkenaan dengan permasalahan. Hal ini merupakan teknis yang harus mampu dilakukan oleh mediator sebagai pihak ketiga dalam mendamaikan perkara perceraian.

Kualifikasi mediator dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 terdapat pada Pasal 13 meliputi :

- a) Setiap Mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi oleh Mahkamah Agung, tetapi dalam kenyataannya ada mediator yang digunakan di Pengadilan Negeri tidak mempunyai sertifikat karena keterbatasan mediator karena jumlah mediator bersertifikat hanya 1.102 orang yang tersebar di 910 peradilan yang ada di Indonesia, yang berarti tiap peradilan apabila dirata-ratakan hanya terdapat 1,21 orang mediator bersertifikat;
- b) karena keterbatasan mediator ada kebolehan untuk menggunakan hakim yang belum mempunyai sertifikat, hal inilah yang menyebabkan mediasi tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya karena hakim tersebut belum menguasai teknik mediasi.

Indikator keahlian mediator meliputi:

- a) kemampuan dalam melakukan diagnos konflik;
- b) kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan kepentingan-kepentingan kritis;



- c) memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
- d) mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar;
- e) membantu para pihak dalam mengumpulkan informasi penting;
- f) penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan.<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa indikator di atas, kemampuan dalam menyampaikan kata-kata yang tepat dan tidak terkesan berpihak kepada salah satu pihak merupakan bagian terpenting dalam proses mediasi. Karena mediator tidak bisa memihak kepada salah satu pihak melainkan mencari solusi dari permasalahan yang terjadi.

Mediator harus terpanggil hati nuraninya secara optimal untuk mengusahakan perdamaian, tidak hanya terjebak pada usaha mencari fakta kualitas perselisihan itu sendiri sedangkan ia tidak mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi pertengkaran itu.

Terkait dengan indikator keterampilan tawar-menawar dan penciptaan pilihan-pilihan bagi para pihak yang berperkara di atas. Berdasarkan pengalaman Otto Hasibuan sebagai advokad, menuturkan bahwa selama pengadilan tidak lebih baik mediasi akan selalu diragukan. Penuturan Otto ini tidak serta merta diucapkannya tetapi berpijak terhadap asumsi masyarakat mau melakukan mediasi karena berharap *win-win solution*. Apabila pengadilan memiliki reputasi tentang konsistensi dan ketegasan putusannya maka pihak yang bersengkata akan memilih menghindari litigasi yang berujung menang kalah.

---

<sup>24</sup> Abdul Halim Talli. "Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2.1 (2015): 76-93.

Faktanya, menurut Otto sudah menjadi hal yang umum diketahui bahwa masih masih ada mafia peradilan yang mampu mempengaruhi putusan hakim belum lagi mekanisme eksekusi yang tak mudah.<sup>25</sup>

Kurang keahlian dari mediator karena kebanyakan yang menjadi mediator berasal dari hakim sendiri yang belum mempunyai sertifikat mediator yang disebabkan karena keterbatasan personil.

- 2) Jumlah mediator yang bersertifikat tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk contohnya pada tahun 2016 berdasarkan data dari Mahkamah Agung jumlah mediator yang bersertifikat di seluruh Indonesia sebanyak 1102 orang yang disebar dalam semua peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding.<sup>26</sup>
- 3) Mediator berasal dari unsur hakim sehingga membuat mediator sulit untuk memposisikan dirinya antara sebagai hakim atau mediator.
- 4) Tidak adanya mediator diluar pengadilan yang memiliki waktu panjang sehingga tidak bisa menjalankan proses mediasi secara maksimal.
- 5) Mediator dari unsur hakim cenderung kurang sabar dan teliti terhadap proses mediasi yang membuat mediasi hanya dilakukan satu atau dua kali saja dengan waktu yang sedikit.

#### b. Sarana dan Pra Sarana

Tempat pelaksanaan mediasi merupakan faktor yang sedikit banyaknya turut menjadi penunjang keberhasilan mediasi. Tempat pelaksanaan mediasi diberbagai

---

<sup>25</sup> “Konferensi Adhaper 2018: Mediasi di Persidangan Pilihan Solusi yang Belum Menjadi Solusi”, *Situs Resmi Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b74e94b8ebc2/mediasi-di-persidangan--pilihan-solusi-yang-belum-menjadi-solusi> (29 Mei 2020).

<sup>26</sup> <https://gagasanriau.com/mobile/detailberita/33991/jumlah-hakim-dan-mediator-di-indonesia-masih-minim>, Diakses 29 Mei 2020 Pukul 22.09 WITA.

Pengadialan Negeri sudah cukup layak namun tidak sebanding dengan jumlah perkara yang mau dimediasi dengan ruangan yang tersedia.

Terkait dengan standar sarana dan pra sarana belum ada indikator yang ditentukan oleh Mahkamah Agung tetapi berdasarkan dari laporan hasil penelitian di beberapa Pengadilan Negeri hanya memiliki 1 ruang mediasi yang berukuran 6X9 meter, di dalamnya hanya ada 1 buah meja panjang yang letaknya di tengah dan terdapat kursi lipat dengan jumlah sesuai yang dibutuhkan.<sup>27</sup> Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti, terdapat 1 Pengadilan Negeri yang dianggap layak yaitu Pengadilan Negeri Cibinong, ruang mediasi lebih dari 1 ruangan yang berukuran kurang lebih 6X9 meter dan juga dilengkapi oleh beberapa fasilitas yang dapat membantu keberhasilan mediasi, di ruang mediasi terdapat meja bundar dan dikelilingi oleh kursi tradisional jawa, pendingin ruangan, hiasan tanaman serta jendela tembus pandang ke ruang terbuka hijau yang dapat menyejukkan hati dan juga terdapat ruang kaukus yang akan memberi tempat bagi pihak yang berperkara yang ingin curhat kepada hakim mediator dan ruangan tersebut dilengkapi oleh 3 buah kursi, 1 meja serta 1 papan tulis.<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di atas, apabila dilihat dari standar kelayakannya maka Pengadilan Negeri Cibinong bisa dijadikan standar untuk ruang mediasi di seluruh Pengadilan Negeri agar proses jalannya mediasi dapat berjalan dengan baik karena proses keberhasilan mediasi sangat tergantung pada sarana dan pra sarana yang ada di Pengadilan Negeri itu sendiri.

---

<sup>27</sup> Arum Kusumaningrum and Benny Riyanto Yunanto. "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang." *Diponegoro Law Journal* 6.1 (2017): 1-10.

<sup>28</sup> <https://news.detik.com/berita/2336488/eks-hakim-jepang-terpukau-dengan-ruang-mediasi-pn-cibinong?nd772204btr=>, Diakses 29 Mei 2020, Pukul 22.21 WITA.

### c. Jangka Waktu Penyelesaian

Menurut Ismail Rumadan yang berkecimpung pada Lembaga Penelitian Mahkamah Agung, di Indonesia memang belum ada penelitian yang membuktikan bahwa mediasi merupakan proses cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Akan tetapi apabila didasarkan pada logika bahwa jika perkara diputus, pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun dari sejak pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sebaliknya, apabila perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak para pihak.<sup>29</sup>

Penuturan tersebut di atas menandakan bahwa jangka waktu penyelesaian perkara sangat lama termasuk pada perkara perceraian.

### 3. Budaya Hukum

Dalam lingkungan masyarakat tertentu di Indonesia, masih didominasi oleh sifat komunalisme berupa kesamaan pandangan terhadap suatu peristiwa atau kepercayaan kepada otoritas tertentu yang mampu menyelesaikan masalah.

Berikut di bawah ini berdasarkan Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata V di Jember tanggal 10-12 Agustus 2018 para pakar hukum dari berbagai profesi sesuai dengan pengalamannya menyatakan sebagai berikut: <sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri”, *Situs Resmi Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI*. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/component/k2/item/5-efektivitas-pelaksanaan-mediati-di-pengadilan-negeri.html> (29 Mei 2020).

<sup>30</sup> “Konferensi Adhaper 2018: Mediasi di Persidangan Pilihan Solusi yang Belum Menjadi Solusi”, *Situs Resmi Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b74e94b8ebc2/mediati-di-persidangan--pilihan-solusi-yang-belum-menjadi-solusi> (29 Mei 2020)

Aswirman memaparkan bahwa upaya perdamaian sudah lama tidak memiliki daya tarik dalam peradilan karena nilai-nilai budaya musyawarah dan mufakat masyarakat Indonesia sudah luntur sejak masuknya model peradilan sistem kolonial. Dengan asumsi tersebut, perdamaian sudah tidak dianggap sebagai penyelesaian. Masyarakat memang datang ke pengadilan untuk putusan menang atau kalah dari hakim. Beliau membandingkan dengan keberhasilan di Jepang karena nilai budaya dan komunalisme yang terus terpelihara.

Penuturan Aswirman tersebut sama dengan yang dijelaskan oleh Yohanes Sogar Simamora. Beliau meyakini bahwa keberhasilan mediasi sangat terkait dengan budaya. Dikarenakan budaya hukum yang dipahami oleh segelintir masyarakat dalam bersengketa selama ini tidak mau kalah sedikitpun.

Pemaparan dari Yaswirman dan Yohanes ini kemudian dikuatkan oleh Basuki yang mengemukakan bahwa telah terjadi pergeseran sistem nilai nenek moyang masyarakat Indonesia yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Basuki juga menilai bahwa ada beberapa kemungkinan kendala teknis yang membuat mediasi di persidangan tidak berhasil diantaranya bisa jadi mediator yang tersedia dari para hakim mediator tidak cukup mahir untuk mendamaikan para pihak.

Penuturan dari berbagai pakar dan praktisi hukum di atas diperkuat oleh berbagai hasil penelitian seperti Yogi Wahyudi<sup>31</sup>, Arum Kusumaningrum<sup>32</sup>, Ermi

---

<sup>31</sup> Lihat Yogi Wahyudi. *Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)*. Diss. IAIN Metro, 2020.

<sup>32</sup> Lihat Arum Kusumaningrum and Benny Riyanto Yunanto. "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang." *Diponegoro Law Journal* 6.1 (2017): 1-10.



Suryani<sup>33</sup>, Indriati Amarini<sup>34</sup> dimana dalam hasil penelitiannya pada dasarnya mengungkapkan bahwa budaya masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan atau gagalnya mediasi.

Merujuk pada hasil pengamatan berbagai pakar/praktisi hukum dan laporan penelitian di atas, maka kegagalan upaya perdamaian perkara perceraian sangat dipengaruhi oleh pandangan masyarakat bahwa keberadaan lembaga mediasi melalui pengadilan tidak akan dapat lagi menyelesaikan perkaranya secara damai yang disebabkan oleh alasan-alasan antara lain :

- a. Pihak yang berperkara tidak ingin di mediasi disebabkan karena sebelum ke pengadilan kedua pasangan suami isteri tersebut sudah bertengkar hebat lalu ketika diperintahkan untuk melakukan mediasi mereka tidak mau, karena asumsi mereka pasti akan gagal lagi.
- b. Keinginan yang sangat kuat oleh para pihak untuk bercerai karena pada umumnya telah gagal melakukan upaya perdamaian yang dilakukan secara kekeluargaan, sebelum pihak yang berperkara mengajukan gugatan ke pengadilan untuk bercerai secara resmi.

Penyebab kurang antusiasnya para pasangan yang hendak bercerai dalam menempuh proses mediasi disebabkan oleh hal-hal seperti:

- a. Konflik yang terjadi sudah lama dan berlarut-larut seperti masalah ekonomi karena keberlangsungan dan kebahagiaan hubungan rumah tangga dipengaruhi oleh keberadaan ekonomi yang memadai, apabila kondisi masalah ekonomi buruk

---

<sup>33</sup> Lihat Ermi Suryani. *Tingkat Perceraian Pasangan Muslim Dan Pasangan Non Muslim di Pengadilan: Agama dan Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor dalam Studi Komparatif*. MS thesis. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>34</sup> Lihat Indriati Amarini. "Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan." *Kosmik Hukum* 16.2 (2017).



biasanya akan berakibat buruk atau dapat memunculkan suatu pertengkaran antara suami isteri yang berujung pada perceraian. Sehingga membuat kedua belah pihak tidak mau lagi mendengar masukan dari pihak lain termasuk mediator.

b. Masalah yang dialami para pihak adalah masalah yang unik dan menyangkut perasaan atau psikologis seperti:

1) kekerasan verbal berupa suatu penganiayaan yang dilakukan pasangan yang satu terhadap pasangan yang lainnya dalam bentuk mengungkapkan kalimat kasar, menghina merendahkan martabat pasangan dan sebagainya.

2) Perselingkuhan adalah suatu perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh seseorang antara suami atau isteri dengan orang lain yang tidak memiliki hubungan yang sah. Seseorang yang diselingkuhi tentunya sangat kecewa dan merasa dikhianati yang mengakibatkan terjadinya sebuah perceraian.<sup>35</sup>

c. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh salah satu dari pasangan suami isteri terhadap pasangan lainnya maka jiwanya selalu merasa terancam sehingga tidak merasakan ketenangan dalam hidupnya lagi.

d. Tidak patuh terhadap ajaran agamanya lagi khusus terhadap penganut agama Kristen dan Katolik yang memandang hanya kematian sajalah yang bisa memisahkan perkawinan (Al-Kitab Markus 10:9 jo Kitab Perjanjian Baru Matius 19:6). Dengan demikian, bagi Non Muslim penganut agama Kristen dan Katolik apabila tetap berkeinginan memutuskan perkawinannya tanpa izin dari gereja yang berkompeten maka dianggap tidak patuh lagi pada ajaran Kristus.

Beberapa penyebab di atas, yang menyebabkan sulit sekali untuk didamaikan kembali. Dengan demikian, apabila masyarakat menganggap bahwa upaya perdamaian

---

<sup>35</sup> Agoes Dariyo and D. F. P. U. I. Esa. "Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga." *Jurnal Psikologi* 2.2 (2004): 94-100.

dalam bentuk mediasi yang ditempuh di Pengadilan Negeri mampu menyelesaikan perkara perceraian yang diajukan oleh para pihak maka perdamaian dapat tercapai, akan tetapi bila masyarakat mempunyai pandangan bahwa mediasi tidak mampu menyelesaikan masalah mereka yang berperkara maka mediasi akan gagal. Hal ini berarti pandangan masyarakat sendirilah yang menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan mediasi di pengadilan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya yang terdapat dalam skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan upaya perdamaian perkara perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri belum optimal karena hanya sekedar memenuhi persyaratan secara formal seperti pemilihan mediator oleh para pihak, pemanggilan para pihak, kewajiban menghadiri, proses mediasi dan jangka waktu penyelesaian. Hal ini ditandai dengan adanya Pengadilan Negeri yang menetapkan proses mediasi sepakat atau tidak sepakat hanya kurang dari 30 hari.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan upaya perdamaian perkara perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri, yaitu :
  - a. Substansi hukum, tidak ada yang menghambat jalannya proses mediasi karena telah tersedia aturan yang memperlancar kesuksesan mediasi itu sendiri seperti jangka waktu penyelesaian lebih singkat maksimal 30 hari, para pihak wajib hadir secara langsung dan yang berhalangan dapat menggunakan media audio visual, telah ada sanksi bagi para pihak yang tidak beriktikad baik dan tidak dikenakan biaya apabila mediator berasal dari unsur hakim dan pegawai pengadilan.
  - b. Struktur hukum, yang menghambat antara lain mediator yang digunakan umumnya berasal dari kalangan hakim yang tidak bersertifikat, sehingga kurang menguasai teknik mediasi, sulit untuk memposisikan dirinya sebagai hakim atau mediator, cenderung kurang sabar dan teliti terhadap proses mediasi, sedangkan apabila

menggunakan mediator dari luar para pihak dikenakan biaya yang dianggap membebani. Jumlah mediator bersertifikat tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk. Tidak adanya mediator diluar pengadilan yang memiliki waktu panjang sehingga tidak bisa menjalankan proses mediasi secara maksimal.

- c. Budaya hukum, yang menghambat dalam masyarakat nilai-nilai musyawarah dan mufakat telah luntur, sehingga proses mediasi di pengadilan tidak dipercaya lagi mampu menyelesaikan permasalahannya karena telah tercipta dalam pemahaman masyarakat pencari keadilan bahwa pengadilan hanya memutus tentang kalah atau menang.

### ***B. Saran***

Mencermati rendahnya perkara perceraian yang berhasil didamaikan maka penulis menyarankan, sebagai berikut :

1. Apabila dalam proses mediasi tidak/belum tercapai kesepakatan, hendaknya mediator menunda/menunggu sampai batas waktu 30 hari untuk tetap mengupayakan perdamaian.
2. a. Substansi Hukum, Penggugat yang tidak beriktikad baik perlu diberikan sanksi yang lebih tegas.  
b. Struktur hukum, diperlukan penambahan mediator dari unsur hakim dan luar hakim yang memiliki sertifikat dan diberi insentif yang ditanggung oleh negara.  
c. Budaya hukum, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pengadilan bukanlah tempat hanya sekedar melegalisasi putusnya ikatan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Alam, Andi Syamsu. *Reformasi Peradilan Agama di Indonesia*. Makassar: Yapensi, 2004.
- Ali, Achmad. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yasril Watampone, 1998.
- Arto, A. Mukti. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'iyah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Goodpaster, Gary. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project, 1993.
- Hardiwardoyo, Al Purwa. *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Harlen Sinaga, V. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materil*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Istiqamah. *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- . *Hukum Perdata di Indonesia*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Jayadi, Ahkam. *Hukum dan Keadilan Menguak Kewenangan Penegak Hukum Dalam Penahanan dan Penangguhan Penahanan*. Yogyakarta: Kota Kembang, 2009.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Modul Hukum Perdata: Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Kasir Ibrahim, M. *Kamus Arab-Indonesia dan Indonesia-Arab*. Surabaya: UD. Apollo, 2011.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Marilang, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Makassar: Alauddin Press, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Liberty, 1998.
- MK, M. Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.



- Noorshofa. *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*. Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpera, 1996.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. *Azaz-Azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Rasyid, Chatib. *Upaya Perdamaian dalam Sengketa Perceraian*. Yogyakarta: Mimbar Hukum 1994.
- Republik Indonesia. *KUHPerdata dan KUHAPerdata*. Jakarta: Pustaka Buana, 2014.
- , *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan*. Yogyakarta: Lintang Pustaka, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Salim, Nasharuddin. *Pemberdayaan Lembaga Damai Pada Pengadilan Agama Mimbar Hukum*. Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpera, 2004.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Soetojo, Prawirohamidjojo R dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1982.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- , *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 1992.
- Sutanto, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni, Bandung. 1986.
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Haris. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestika Pustaka Publisher, 2006.
- UIN Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Waridah, Ernawati. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bmedia, 2017.
- Yahya Harahap, M. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.



**Perundang-Undangan:**

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Republik Indonesia, UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Republik Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 Amandemen.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia, UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

**Jurnal:**

Talli, Abdul Halim. "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6.2 (2019): 133-146.

Siburian, Bernhardt. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017." *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 1.1 (2019): 31-39.

Kusumaningrum, Arum, and Benny Riyanto Yunanto. "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang." *Diponegoro Law Journal* 6.1 (2017).

Amarini, Indriati. "Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan." *Kosmik Hukum* 16.2 (2017).

Istiqamah, Istiqamah. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam dan Kuhperdata)." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4.1 (2017): 54-67.

Nurjannah, Sitti, "Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Melalui Choice Of Law." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2.2 (2016): 160-167.

Jumadi, Jumadi. "Negara Hukum dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4.1 (2017): 68-82.

Talli, Abdul Halim. "Mediasi Dalam Perma No. 1 Tahun 2008." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2.1 (2015): 76-93.

Dariyo, Agoes, and D. F. P. U. I. Esa. "Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga." *Jurnal Psikologi* 2.2 (2004): 94-100.

**Disertasi:**

Wahyudi, Yogi. *Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)*. Diss. IAIN Metro, 2020.

Azzahra, Trisya. *Penerapan Aturan Iktikad Tidak Baik Dalam Mediasi di Pengadilan Negeri (Studi Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2019.

Tambunan, Bunga Tiurmaida. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Menurut Hukum Hindu dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Nomor 73/Pdt. G/2014/PN. Mdn)*. Diss. Universitas Medan Area, 2016.

Kristanti, E. S. (2010). *Status Hukum Terhadap Perkawinan Konghucu Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro).

**Tesis:**

Suryani, Ermi. *Tingkat Perceraian Pasangan Muslim dan Pasangan Non Muslim di Pengadilan: Agama dan Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor dalam Studi Komparatif*. MS thesis. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Skripsi:**

Bisman, Bisman. *Efektivitas Kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian di Kecamatan Makassar*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.

Firmansyah, Imam. "Perkawinan dalam pandangan agama islam dan buddha; sebuah studi perbandingan a." (2012).

Milana, Restami. *Efektivitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2015*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Suryani, Ermi. "Perceraian Muslim dan Non Muslim (Studi Kasus di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor)."

**Website:**

"Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri", *Situs Resmi Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI*. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/component/k2/item/5-efektivitas-pelaksanaan-mediasi-di-pengadilan-negeri.html> (29 Mei 2020).

"Konferensi Adhaper 2018: Mediasi di Persidangan Pilihan Solusi yang Belum Menjadi Solusi", *Situs Resmi Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b74e94b8ebc2/mediasi-di-persidangan--pilihan-solusi-yang-belum-menjadi-solusi> (29 Mei 2020).

<https://www.kompasiana.com/edysupriatna/5dd5f807097f36783a5a35d2/balada-bp4-lembaga-urusan-nasihat-kawin-hingga-cerai-matisuri?page=all>.

<http://denkayu.blogspot.com/2014/12/perkawinan-menurut-hukum-hindu.html>.

[https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_remository&Itemid=46&func=select&id=494](https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=select&id=494).

<https://www.kompasiana.com/afnita/551970b98133111b779de106/perceraian-menurut-iman-kristen>.

<http://newslab.uajy.ac.id/2018/12/10/perceraian-menurut-pandangan-agama-katolik/>.

<https://internasional.kompas.com/read/2015/09/09/02021161/Paus.Fransiskus.Sederhanakan.Perceraian.Katolik>.

<https://dharmadana.id/perceraian-dalam-pandangan-hindu/>.

<http://bluelotus4happiness.blogspot.com/2009/12/perceraian-dalam-buddhisme.html>.

<https://zonautara.com/2018/04/04/yosadi-perceraian-terjadi-jika-ada-kegentingan-memaksa/>.

[http://pn-pasarwajo.go.id/?page\\_id=2214](http://pn-pasarwajo.go.id/?page_id=2214).

<https://kumparan.com/florespedia/60-perkara-perceraian-didaftarkan-ke-pn-kupang-di-awal-tahun-2019-1qzFjmOJh6J>.

<https://www.antaranews.com/berita/677418/kasus-perceraian-non-muslim-di-bengkalis-meningkat-tajam>.

<https://manado.tribunnews.com/2019/12/03/kasus-perceraian-di-manado-semakin-meningkat-kultur-di-sulut-membantu-perempuan-buka-suara>,

<https://kumparan.com/bumi-papua/sepanjang-2019-79-pasutri-di-kota-jayapurabercerailsbN4HjacpC#:~:text=Jayapura%2C%20BUMIPAPUA.COM%20%2D%20Sepanjang,sama%20tercatat%20pada%20tahun%20sebelumnya>.

<http://sbmi.or.id/2019/12/mengenal-perma-no-1-tahun-2018-tentang-mediasi/>.

<https://www.pn-kabanjahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi.html>,

<https://www.hukumonline.com/index.php/komentar/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016/>.

<https://pn-bandung.go.id/hal-alur-mediasi.html>.

<http://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/prosedur-sederhana>.

<http://pn-blangejeren.go.id/link/201602201023242499956c8308c8e126.html>.

<https://ugm.ac.id/id/berita/4759-penyelesaian-sengketa-dengan-mediasi-di-indonesia-rendah>.

<https://gagasanriau.com/mobile/detailberita/33991/jumlah-hakim-dan-mediator-di-indonesia-masih-minim>.

<https://news.detik.com/berita/2336488/eks-hakim-jepang-terpukau-dengan-ruang-mediasi-pn-cibinong?nd772204btr=>.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 505 Tahun 2020

T E N T A N G

**PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL/SKRIPSI  
TAHUN 2020**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan  
Nama : Ahmad Sabran  
NIM : 10400116093  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Hari/Tanggal : Rabu, 13 Mei 2020  
Prihal : Ujian Seminar Proposal/Skripsi  
Judul : "Analisis Hukum Terhadap Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Proposal/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahkan tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Proposal/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.  
Sekretaris : Abd. Rais Asmar, S.H., M.H  
Penguji I : Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H  
Penguji II : Muh. Amiruddin, S.H., M.H  
Pelaksana : 1. Ummu Kalsum, S.Sos  
2. Herawati, S.H.
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Proposal/Skripsi  
**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2020;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Romang Polong

Pada tanggal : 11 Mei 2020

Dekan



MUAMMAR MUHAMMAD BAKRY

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;

Nomor : B- 449 /SH.O1/PP.00.9/05/2020  
Sifat : Penting  
Hal : **Undangan Ujian Seminar Proposal**

Romang Polong, 11 Mei 2020

**Kepada Yth :**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag. | (Ketua )        |
| 2. Abd. Rais Asmar, S.H., M.H                | (Sekretaris)    |
| 3. Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H          | (Penguji I)     |
| 4. Muh. Amiruddin, S.H., M.H                 | (Penguji II)    |
| 5. Dr. H. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag     | (Pembimbing I)  |
| 6. Siti Nurjannah, S.H., M.H.                | (Pembimbing II) |
| 7. Pelaksana                                 |                 |

di

Tempat

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Proposal/Skripsi atas nama :

Nama : Ahmad Sabran  
NIM : 10400116093  
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu, Saudara/(i) untuk menghadiri Ujian Seminar Proposal/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Mei 2020  
Waktu : Pukul 11.00-12.00 Wita  
Pelaksanaan : Online/ Daring

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

*Wassalam*

Dekan



**MUAMMAR MUHAMMAD BAKRY**

Tembusan:

- Rektor UIN Alauddin Makassar di Romang Polong,



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 577 Tahun 2020

TENTANG

**PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI  
TAHUN 2020**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

*Membaca* : Surat Permohonan  
Nama : Ahmad Sabran  
NIM : 10400116093  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Hari/Tanggal : Senin, 22 Juni 2020  
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
Judul : "Analisis Hukum Terhadap Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri"

*Menimbang* : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

*Mengingat* : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

*Menetapkan* :  
*Pertama* : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Dr. H Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag  
Sekretaris : Abd. Rais Asmar, S.H., M.H  
Penguji I : Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H  
Penguji II : Muh. Amiruddin, S.H., M.H  
Pelaksana : 1. Ummu Kalsum, S.Sos  
2. Herawati, S.H

*Kedua* : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
*Ketiga* : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2020;

*Keempat* : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Romang Polong

Pada tanggal : 17 Juni 2020

Dekan,



MUAMMAR MUHAMMAD BAKRY

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Romang Polong;



Nomor : B- 476 /SH.O1/PP.00.9/06/2020  
Sifat : Penting  
Hal : **Undangan Ujian Seminar Hasil**

Romang Polong, 17 Juni 2020

**Kepada Yth :**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Dr. H Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag | (Ketua )        |
| 2. Abd. Rais Asmar, S.H., M.H              | (Sekretaris)    |
| 3. Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H        | (Penguji I)     |
| 4. Muh. Amiruddin, S.H., M.H               | (Penguji II)    |
| 5. Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag           | (Pembimbing I)  |
| 6. St. Nurjannah, S.H., M.H                | (Pembimbing II) |
| 7. Pelaksana                               |                 |

di

Tempat

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Ahmad Sabran  
NIM : 10400116093  
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu, Saudara/(i) untuk menghadiri Ujian Seminar Hasil/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 22 Juni 2020  
Waktu : Pukul 10.00- Selesai  
Pelaksanaan : Online/ Daring

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Wassalam  
Dekan,

**MUAMMAR MUHAMMAD BAKRY**

Tembusan:

- Rektor UIN Alauddin Makassar di Romang Polong;

# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

### FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Ronang Polong – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

#### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 524 Tahun 2020

#### T E N T A N G

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF) TAHUN 2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan Atas Nama **Ahmad Sabran, NIM : 10400116093** Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi **Ilmu Hukum** tanggal 15 Mei 2020 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian;  
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahi tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Keputusan;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.  
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar Tentang Panitia, Penguji Dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif
- Pertama** : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta** Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, Sebagai Berikut :

NAMA / NIM	TEAM PENGUJI			PELAKSANA KET/SEK/ANGG
	MKDK/FIKIH & USUL FIKIH	MKDU/DIS	MKKP	
Ahmad Sabran 10400116093	Andi Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag	Dr. Darsul S Puyu, M.Ag	Abd. Rais Asmar, S.H., M.H	Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd. Mujahidah, S.E

- Kedua** : **Tugas Panitia** mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Ketiga** : **Tugas Penguji** melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Keempat** : **Tugas Panitia dan Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2020;
- Keenam** : **Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**KEPUTUSAN** ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Romang Polong

Pada tanggal : 15 Mei 2020

Dekan,



MUHAMMAD MUHAMMAD BAKRY

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa. (Sebagai Laporan)

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
Nomor : 721 Tahun 2020  
**TENTANG**  
**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI TAHUN 2020**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan : Ahmad sabran  
N I M : 10400116093  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juli 2020  
Perihal : Ujian Munaqasyah /Skripsi  
Judul : "Analisis Hukum Terhadap Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian Non Muslim Di Pengadilan Negeri"
- a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi
- b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
- c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Dr. H. Muammar Muhammaad Bakry, Lc., M.Ag.  
Sekretaris : Dr. Hj. Rahmatiah. HL, M.Pd ,  
Penguji I : Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H  
Penguji II : Muh. Amiruddin, S.H., M.H  
Pelaksana : Ilan Asrian S.Ag., M.A. .
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat ditebitkannya Surat Keputusan ini dibeban kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2020;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Romang Polong  
Pada tanggal : 14 Juli 2020



Muammar Muhammad Bakry

Tembusan:  
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B – 609 /SH.01/PP.00.9/07/2020  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : **UNDANGAN MUNAQASYAH**

Romang Polong 14 Juli 2020

**Kepada**

- Yth. 1. Dr. H. Muammar Muh. Bakry, Lc., M.Ag. (Ketua )  
2. Dr. Hj. Rahmatiah. HL, M.Pd (Sekertaris)  
3. Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H (Penguji I)  
4. Muh. Amiruddin, S.H., M.H (Penguji II)  
5. Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. (Pembimbing I)  
6. St. Nurjannah, S.H., M.H (Pembimbing II)  
7. Pelaksana

di  
Makassar

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Ahmad Sabran  
N I M : 10400116093  
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juli 2020  
Buka Sidang : 08.00 WITA  
Waktu : Pukul 10.00 – 11.00 WITA  
Pelaksanaan Online

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

*Wassalam*



**Muammar Muhammad Bakry**

## RIWAYAT HIDUP



Ahmad Sabran, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 02 Juni Tahun 1998, merupakan anak tunggal dari pasangan Drs. Saharuddin dan Istiqamah, S.H., M.H. Pertama kali penulis menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri Pao-Pao Kab. Gowa dari tahun 2004-2010. Kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama di Pesantren Modern IMMIM Putra Makassar selama 1 Tahun, lalu berpindah ke Pesantren Madrasah Madani Alauddin hingga ke tingkat Aliyah dan tamat pada tahun 2016. Kemudian setelah tamat, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum terhitung mulai tahun 2016 hingga tamat pada tahun 2020 dengan IPK 3.83 (Cumlaude).

Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah Swt bisa menimba ilmu yang merupakan bekal di masa depan. Penulis sangat berharap dapat mengamalkan ilmu yang sudah diperoleh dengan baik dengan membahagiakan kedua orangtua yang selalu mendoakan dan mendukung serta membanggakan Almamaterku UIN Alauddin Makassar dan berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga dan masyarakat.